

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAERAH
PERBATASAN KECAMATAN LUMBIS OGONG,
KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NATAL LIMBONG

NIM. 500897765

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pendidikan daerah Perbatasan kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan** adalah hasil karya saya sendiri tanpa cuplikan atau kutipan dari penelitian orang lain

Apabila dikemudian hari terbukti tulisan ini plagiat atau penjiplakan maka saya bersedia menerima saknsi akademik

Tarakan, Juni 2018

g membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

9A3A7AEF237021978

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Limong
Nim 500897765

*ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF EDUCATION POLICY IN BORDER AREA LUMBIS
OGONG SUBDISTRICT, NUNUKAN REGENCY*

Natal Limbong
Limbongnatal07@gmail.com

Graduated Program
Universitas Terbuka

The objective of this research is to know the implementation of education policy in border area. The kind of this research is qualitative description with the speaker is head of UPD DISDIK Lumbis, subdistrict head of Lumbis Ogong, the committee of SMPN 1 Lumbis Ogong, teachers in elementary and junior high school, and the public figures This research was held in Lumbis Ogong Subdistrict, Nunukan Regency with the measuring instrument by observation, interview, documentation, and data presentation using interactive data analysis model. Based on the result of this research, the implementation of education policy in border area of Lumbis Ogong having a lack human resources, where some school have a shortages of teacher because there is not an equity in this area. Those school also lack of education facilities and infrastructure , such as the shortages of books, there is not Science and Language Laboratorium, shortages of sport equipment and field facilities , damaged of homes and school buildings. Also the high cost of transportation due to the access through road, river and inadequate communication tools. Meanwhile, the source of school operational fundign is not sufficient to support the infrastructure of the school neededs.

Keywords : implementation policy, education in border area

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAERAH PERBATASAN
KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN

Natal Limbong
limbongnatal07@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan daerah perbatasan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan narasumber yaitu kepala UPT DISDIK Lumbis, Camat Lumbis Ogong, Komite SMPN 1 Lumbis Ogong, Guru SD dan SMP, serta Tokoh Masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan penyajian data dengan menggunakan model analisis interaktif data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan daerah perbatasan Lumbis Ogong mengalami kekurangan dari segi, sumber daya manusia, dimana di beberapa sekolah mengalami kekurangan tenaga guru karena belum adanya pemerataan guru di masing-masing sekolah. Selain itu juga ketidaklengkapan sarana dan prasarana pendidikan, seperti kekurangan buku-buku paket, tidak tersedianya Laboratorium IPA dan Bahasa beserta kelengkapan laboratoriumnya. Kekurangan alat-alat olah raga beserta fasilitas lapangannya, rumah dinas dan gedung sekolah yang rusak, serta mahal biaya transportasi dikarenakan akses jalan melalui sungai. Dan alat komunikasi yang belum memadai. Adapun sumber dana kekurangan bantuan operasional sekolah tidak mencukupi untuk menunjang prasarana kebutuhan sekolah yang diterima belum cukup untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, serta sistem pengelolaan pendidikan yang merata tidak dapat menjangkau sekolah yang lokasinya sangat jauh.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendidikan Daerah Perbatasan

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah
Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten
Nunukan

Penyusun : Natal Limbong

Nim : 500897765

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP 19660619199203 1 002



Dr. Mustainah M, M.Si
NIP 196308101988032001

Ketua Bidang Program Magister
Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP 195910271986031003

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu
Politik, Program Pasca Sarjana



Prof. Daryono, SH, Ph.D
NIP 196407221989031019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

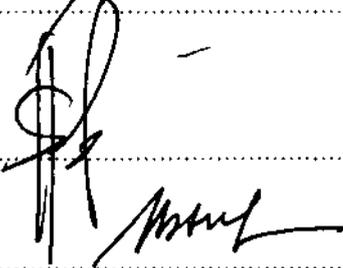
PENGESAHAN

Nama : Natal Limbong
Nim : 500897765
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah
Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten
Nunukan

Penelitian ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas akhir Program
Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas
Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018
Waktu : 08.15 – 09.30 Wita
Dinyatakan : Lulus

PANITIA PENGUJI

Nama	Tanda tangan
Ketua Komisi	
Dr. Darmanto, M.ED Penguji Ahli	
Prof. Dr. Azhar Kasim, M.PA	
Pembimbing I	
Dr. Sofjan Aripin, M.Si Pembimbing II	
Dr. Mustainah M, M.Si	

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Sang Pencipta oleh karena AnugrahNya telah memberi kemampuan dan kesehatan bagi Penulis dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang Mahasiswa. Penulis memiliki kewajiban dalam menyusun tesis Penelitian sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Tesis ini juga merupakan tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan Judul, *Implementasi Kebijakan Pendidikan daerah Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan*. Peneliti berusaha dengan sebaik-baiknya untuk merampung data, mengolah dan melaporkannya dalam tulisan ini, selanjutnya. Peneliti yakin bahwa tesis ini dapat selesai dengan baik atas bimbingan dan bantuan dari semua pihak, oleh sebab itu izinkanlah saya menyampaikan terima kasih Kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka
2. Dekan Fakultas Hukum Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
3. Pusat Pengelolah Program Magister administrasi Publik Universitas Terbuka
4. Dr. Sofjan Aripin M.Si, Kepala UPJJ 51/Tarakan sekaligus dosen Pembimbing I yang telah membimbing Peneliti sehingga dapat diselesaikan dengan baik
5. Dr. Mustainah, M, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II dalam Penelitian ini
6. Seluruh Dosen Program Magiter Administrasi Publik, Universitas terbuka yang telah memberikan masukan pada penelitian ini.

7. Seluruh Senior saya yang telah memberikan bantuan melalui perbaikan proposal ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik
8. Istri (Diana Netty Boru Manurung) dan Kedua Anak saya (Geophany Olsen Limbong Dan Gracya Keyla Boru Limbong) yang tercinta yang telah memberikan dukungan dari awal memasuki perkuliahan Pasca Sarjana sampai pada Penyusunan Proposal ini.
9. Rekan rekan Masiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik S2 Reguler dimana pun berada

Tesis ini bertujuan untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Lunbis Ogong. Oleh sebab itu peneliti mencari data dan fakta lapangan yang dapat dijadikan sebagai baban penyusunan laporan ini.

Peneliti Juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membaca tulisan ini jika dalam penulisan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, Hal ini bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu penulis mohon agar diberikan masukan demi memperkaya tulisan ini.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan Referensi bagi peneliti selanjutnya.

Lumbis, Juni 2018

Natal Limbong

RIWAYAT HIDUP

Natal Limbong, dilahirkan di Jakarta, 26 Desember 1977, Lahir dari Pasangan suami Istri St. Lebanus Limbong dan Rauli Boru Sigalinging, merupakan anak Kedelapan dari Delapan bersaudara. Menikah dengan Diana Netty Boru Manurung pada tanggal 17 Juli 2007 dan melahirkan 2 Anak yang bernama Geophany Olsen Limbong, Gracya Keyla Boru Limbong.

Memulai Pendidikan di SDN 01 Kebon Coklat Jakarta Selatan Tahun 1984 dan tamat pada Tahun 1990. Kemudian melanjutkan Pendidikan Ke SMP Perguruan Rakyat 2 Jakarta Tahun 1990 dan tamat tahun 1993. Meneruskan Pendidikan SMA Pancasila Kabupaten Nunukan Tahun 1993 dan Tamat Tahun 1996, Melanjutkan Kuliah di STT Ikat Jakarta Tahun 2000 Dan Tamat Tahun 2005. Kemudian melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Program Studi Administrasi Publik Tahun 2016.2

Pekerjaan, Sebagai CPNS Kabupaten Nunukan Tahun 2006 sampai dengan 2013 Sebagai Guru Pendidikan Agama Kristen Di SMP Negeri 2 Lumbis Kabupaten Nunukan, Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 mutasi di SMP Negeri 1 Lumbis, Tahun 2018 Tgl 25 Januari dilantik menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sembakung Kabupaten Nunukan hingga sekarang.;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBARAN LAYAK UJI	vi
PERSETUJUAN TAPM	vi
PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	6
1. Konsep Kebijakan Publik	6
2. Konsep Kebijakan Pendidikan	8
3. Jenjang Kebijakan	10
4. Implementasi Kebijakan Publik	11
5. Model Model Implementasi Kebijakan	19
6. Konsep Pendidikan	22
7. Penelitian yang Relevan	27

B. Kerangka Berfikir	34
C. Operasional Konsep	35
BAB III METODE PENELITIAN		
A. Disain Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Tehnik Pengumpulan Data	40
E. Sumber Informasi dan Pemilihan Informen	41
F. Tehnik Pengumpulan Data	41
G. Penyajian Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN		
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	47
1. Keadaan Pendidikan di Kecamatan Lumbis Ogong	48
2. Sarana Dan Prasarana di Kecamatan Lumbis Ogong	50
3. Kondisi Sosial Budaya ekonomi di Kecamatan Lumbis Ogong	52
4. Gambaran Umum Pendidikan Di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan	54
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	62
1. Standar dan sasaran Kebijakan	62
2. Sumber Daya	66
3. Fasilitas (Sarana Prasarana)	72
4. Komunikasi antar Organisasi terkait dengan kegiatan pelaksana	74

5. Karakteristik Agen Pelaksana atau Instansi Pelaksana	77
6. Lingkungan Sosial, Budaya dan Ekonomi	79
7. Disposisi (Kecendrungan Pelaksana)	83
C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah Perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	98
1. Implementasi Pelaksanaan Kebijakan	98
2. Faktor Penghambat	98
B. Saran	99
1. Teoritis	99
2. Praktis	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Implementasi Kebijakan di Daerah Perbatasan	40
Bagan 3.1	Model analisis Interaktif data	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong	60
------------	--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak bisa lagi dielakkan dalam kehidupan telah membawa perubahan hampir di semua aspek kelangsungan hidup dimanapun manusia tersebut berada, sehingga manusia tersebut menentukan sikap jalan arah dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke era persaingan global yang semakin ketat sehingga akibat dari globalisasi semakin nyata terbukanya persaingan antar negara-negara di dunia.

Pendidikan merupakan aspek utama dalam suatu negara yang berguna untuk meningkatkan Sumber Daya manusia (SDM) baik secara fisik maupun intelektual, sehingga mampu mengembangkan diri serta lingkungan dalam menghadapi zaman yang semakin maju dan berkembang untuk pembangunan nasional. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak dalam implementasi di lapangan menemui kegagalan. Kegagalan yang terjadi disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga pendidik tidak sesuai dengan keahliannya, penanganan masalah bukan oleh ahlinya sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencetak generasi yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Peranan pendidikan diantaranya mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk disumbangkan bagi kesejahteraan warga negara yang aktif.

Di Indonesia sistem pendidikan sudah cukup maju, namun tidak diimbangi pemerataan mutu pendidikan di setiap daerah. Oleh karena itu terjadi suatu kesenjangan antara pendidikan di daerah satu dengan daerah lainnya. Contohnya pendidikan di daerah perkotaan misalnya Pulau Jawa dinilai lebih maju dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai, para tenaga pengajarnya pun sangat berkualitas. Berbeda sekali dengan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, tak terkecuali penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan seperti halnya di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dimana mutu pendidikannya masih rendah dan masih minim Infrastruktur.

Masalah minimnya fasilitas pendidikan sangat di rasakan oleh masyarakat di perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong yang keadaannya belum diperhatikan secara penuh oleh pemerintah. Banyak anak didik yang bersekolah dengan menempuh jarak puluhan kilometer untuk sampai ke sekolah. Jalan yang mereka tempuh untuk bisa sampai ke sekolah bukan jalan yang mulus melainkan jalan pintas yang berliku-liku dan naik turun bukit, dimana disana juga terdapat binatang buas dan ular berbisa, semuanya tak pernah mereka peduli hanya karena ingin mengenyam pendidikan. Bukan karena kemauan

untuk menempuh perjalanan melalui jalan pintas, tetapi karena belum ada campur tangan pemerintah serta kondisi alam di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang membuat mereka berlaku seperti itu.

Indikasi ini tidak terlepas dari beberapa masalah yang terjadi pada pendidikan di daerah perbatasan seperti :

1. Minimnya tenaga guru, yang menjadi problem dalam aktifitas belajar dan mengajar di sekolah yang disebabkan oleh karena rekrutmen tenaga guru yang ditugaskan di daerah Lumbis Ogong belum merata sebagaimana dengan jumlah rombel belajar atau yang disebut guru kelas untuk tingkatan Sekolah Dasar dan untuk Tingkat pendidikan SMP guru bidang study, sehingga dengan kekurangan tenaga guru yang ada maka guru yang ada tersebut merangkap mengajar.
2. Aspek sarana dan prasarana berkaitan dengan, Perpustakaan Buku buku pendukung dalam proses belajar seperti buku paket dan buku bacaan tuk siswa belum memadai.
3. Sosialisasi masalah kebijakan pendidikan dari KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) beralih ke K 13 (Kurikulum 13) jarak antara kabupaten dengan kecamatan yang ada (Lumbis Ogong) sangat jauh ditempuh melalui tranfortasi jalur sungai dan jalur darat dan kurangnya informasi mengakibatkan tuk pelatihan tenaga pendidik mengalami hambatan.
4. Budaya Pendidikan masih rendah
Peran serta orang tua dalam kehidupan masyarakat khususnya pendidikan masih minim dikarenakan pola pemikiran yang masih tradisional untuk acara seperti pernikahan masih sering didapatkan anak dibawah umur dinikahkan padahal mereka masih mengenyam pendidikan yang seharusnya masih sekolah.

Melihat dan merespon apa yang dialami oleh dunia pendidikan di daerah perbatasan, maka Penulis terdorong untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan di daerah perbatasan sesuai dengan SK Bupati Nunukan No.188.95/51/11/2014 Tgl 3 Februari 2014 “ Tentang sekolah-sekolah yang berada di wilayah khusus”, dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu ***“Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah Perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Pendidikan di daerah Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong,
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat Implementasi kebijakan pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

D. Manfaat Penelitian

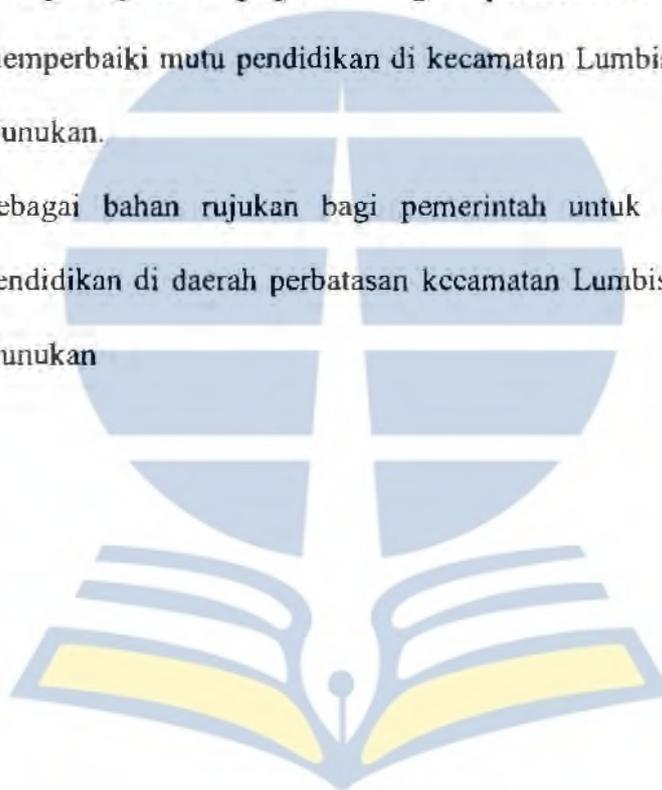
Penelitian yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat, rinci, dan faktual, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi peneliti sendiri dan orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sudut aplikasi dalam konteks kehidupan manusia yaitu:

1. Teoritis
 - a. Sebagai bahan *referensi* bagi *Stekholder* Pendidikan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.
 - b. Sebagai rujukan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan di kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

- c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai informasi yang baru, yang berguna untuk memberikan pemahaman bagi penulis tentang maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan pendidikan.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan *referensi* bagi penulis berikutnya mengenai Pendidikan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.
- b. Sebagai rujukan bagi guru tenaga kependidikan dan *Stekholder* untuk memperbaiki mutu pendidikan di kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.
- c. Sebagai bahan rujukan bagi pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan di daerah perbatasan kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (KBB) diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan Publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas. Kebijakan (*Policy*) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polis* yang artinya kota. Dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Mohan dalam Syafarudin, 2008: 75). Sedangkan kata Publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Jadi disimpulkan bahwa, pengertian kebijakan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan suatu tindakan yang benar dan bersih berdasarkan nilai norma yang mereka miliki.

Pada prinsipnya kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat banyak dan dapat dipertanggungjawabkan, Pengertian Kebijakan Publik menurut para ahli sebagai berikut:

1. *Woll (1966)* Kebijakan Publik adalah sejumlah suatu aktivitas pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai suatu lembaga yang mempengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.
2. *Henz Eulau dan Kenneth previt (1973)* Kebijakan Publik adalah sebagai sebuah keputusan yang tetap, yang ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat suatu kebijakan dan yang melaksanakannya.
3. *Carl Friedrich*, Kebijakan Publik adalah suatu usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu pemerintah guna untuk mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.

Adapun juga ciri-ciri kebijakan publik itu sendiri diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik merupakan suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah
2. Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang Aktor
3. Kebijakan Publik merupakan suatu yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah

4. Kebijakan Publik merupakan sebuah bentuk kongkrit negara dengan rakyatnya
5. Kebijakan Publik merupakan suatu rangkaian sebuah intruksi/pemerintah, Contohnya Undang-Undang.

Kebijakan Publik sebagai ilmu yang sifatnya multidisipliner yang bisa digunakan dalam berbagai disiplin ilmu khususnya dalam kajian kebijakan pendidikan

2. Konsep Kebijakan Pendidikan

Konsep kebijakan pendidikan mengandung makna yang dalam dan luas dan merupakan perdebatan akademik dari para pakar sehingga menimbulkan berbagai jenis definisi dengan berbagai kelemahan serta kelebihan masing-masing.

Sementara Rohman (2009: 108) berpendapat kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci ataupun longgar dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Carter V. Good dalam (Imron, 1996:18) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*Edivational Volicity*) dalam bukunya karya Ali Imron yang berjudul Kebijakan Pendidikan di Indonesia yakni: suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penelitian terhadap factor-faktor yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan

perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai (Imron,1996: 18).

Tilaar (2008: 140) menjelaskan bahwa "Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu". Aspek-apk yang tercakup di dalam kebijakan pendidikan meliputi:

- a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan.
- b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan.
- c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai *validitas* dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu.
- d. Keterbukaan (*openness*)
- e. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan.
- f. Analisis kebijakan.
- g. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik.
- h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang demokratis.
- i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

- j. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi.
- k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik.
- l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional.
- m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat.
- n. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat. (Tilaar, 2008: 141)

Pemahaman tentang kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur dalam bidang pendidikan atau berkaitan dengan pendidikan. Jadi konsep kebijakan pendidikan adalah gambaran umum mengenai aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan.

1. Jenjang Kebijakan

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan.

Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses

dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, *input* (masukan), proses (transformasi), *output* (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai :

- 1) Pedoman untuk bertindak
- 2) Pembatas perilaku dan
- 3) Bantuan bagi pengambil keputusan

Pongtuluran (1995:7). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak, keberadaan kebijakan penting dalam suatu organisasi apapun karena dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai aktivitas strategi untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

2. Implementasi kebijakan Publik

Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi dan administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi. Menurut Mulyadi (2015:24) Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara dalam *Webstar* (Wabab, 205: 65) merumuskan implementasi

secara pendek yaitu *"to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)"*. Sementara *Horn dan Van Meter (1975: 447)* mengartikan implementasi kebijakan sebagai *"those action by public and private individual (or groups) that are directed at achievement of objectives set fort in perior policy decions"*.

Implementasi kebijakan menurut kamus *Webstar* dalam Wahab (2000:64) menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika kita lihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

"memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbu sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Keherhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau

tindakan tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh *gerindle* (Agustino, 2008: 198) sebagai berikut:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat action program tersebut tercapai”.

Sedangkan *Meter dan Horn* (Wahab, 2005: 65) merumuskan proses implementasi sebagai:

“Tindakan-Tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Sedangkan proses implementasi baru dapat dilaksanakan apabila tujuan-tujuan telah ditetapkan dalam bentuk program-program dengan memperhatikan kelemahan, peluang dan kemungkinan resiko terkecil sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu melibatkan berbagai unsur (*stakeholders*) sehingga hasil keputusan melahirkan produk yang mewakili semua kepentingan.

Hal senada juga dirumuskan oleh *Meter dan Horn* dalam Wahab (2000:79) adalah suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, control dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Atas dasar pemikiran tersebut, maka tripologi kebijakan yaitu : (1) jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan, (2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. (3) implementasi akan berhasil apabila perubahan yang

dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi.

Grindle dalam Wahab (2000:127) berpendapat proses implementasi adalah proses kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula sudah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan demi mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas (1) kepentingan yang dipenuhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, (6) sumber data yang dilibatkan secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan agar tujuan-tujuan pemerintah dapat direalisasikan.

Sedangkan menurut Abidin (2012: 155-157) dalam Mulyadi terdapat dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Pendekatan struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan

- *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.
- *Planning of change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan prosedural / manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban / *behavior*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemauan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Mazmanian dan Sabatier (1983) merupakan pencetus teori model rasional dan model analisis kegagalan atau analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). *Mazmanian-Sabatier* mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu :

- *Variabel independen*. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- *Variabel intervening*. Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada

pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- *Variabel dependen.* Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan public dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana; kepatuhan objek; hasil nyata; penerimaan atas hasil nyata; tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan bersikap mendasar.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan antara lain (mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen menurut *Terry*):

1. *Men (Human Resources)*, dalam menejemen publik, sumber daya manusiaini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.

2. *Money (Finances)*, dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
3. *Material (logistik)*
4. *Machine (information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
5. *Methods (legimitate)*, keabsahan atau legimitasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. *Market (participation)*, partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan. keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik. Dikenal ada dua bentuk partisipasi: pertama murni yang muncul secara spontan dari rakyat, kedua mobilisasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu (Mulyadi, 2015: 27).

Implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan berlaku dalam praktik. Implementasi pendidikan dikatakan sebagai konsep yang dinamis memerlukan usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilaksanakan. Implementasi akhirnya dipahami sebagai pengaturan aktifitas yang mengarah pada penempatan program kedalam suatu dampak. (Imron, 1996: 65-66).

Berhasil tidaknya implementasi kebijakan pendidikan menurut Imron ditentukan banyak faktor. Faktor tersebut adalah :

1. Kompleksitas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Semakin kompleks suatu kebijakan yang dibuat, semakin rumit dan sulit untuk diimplementasikannya.

2. Bila rumusan masalah kebijakan dan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang diajukan dalam rumusan tidak jelas.
3. Faktor sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan.
4. Kelahlian pelaksana kebijakan
5. Dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
6. Faktor-faktor efektifitas dan efisiensi birokrasi. (Imron, 1996: 76-77).

Edward III, mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. *Communication* (komunikasi); komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi
2. *Resourcess* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah: a. staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan b. informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi c. dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan d. wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
3. *Disposition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Menurut *Friedrich* (Dalam Winarno, 2004:16), kebijakan sebagai “ Suatu tindakan arah yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

Dari pendapat-pendapat diatas, bahwa fokus penelitian dari kebijakan itu adalah arah tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk mencapai maksud, tujuan, dan sasaran tertentu. Menurut *Anderson* (Wahab 2002:21), kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan *Friedrich* mengemukakan kebijakan atau kebijaksanaan (*Policy*) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. (Wahab 2002:3).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dengan berbagai metode dan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan

a. Model *Merilee S. Grindle*

Keberhasilan implementasi menurut *Grindle* dalam Nugroho (2006) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Isi kebijakan (*content of policy*) mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan

4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan lingkungan kebijakan (*content of implementation*)

mencakup:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

b. Model George C. Edward III

Selanjutnya *George C. Edward III* dalam Subarsono (2005:146) mengemukakan beberapa 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

- a) Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dan kelompok sasaran.
- b) Sumber daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
- c) Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
- d) Struktur birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

d. Model Mazmanian dan Sabatier

Model *Mazmanian dan Sabatier* Subarsono (2005, 65) menjelaskan ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

Karakteristik masalah (*tractability of the problems*), indikatornya adalah : tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; serta cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Karakteristik kebijakan atau Undang-Undang (*ability of stute to structure implementation*), indikatornya adalah: kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; serta seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Variabel lingkungan (*nonstatutory variabel affecting implementasi*), indikatornya adalah: kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

c. Model *Van Meter* dan *Van Horn*

Model *Meter* dan *Van Horn* dalam Subarsono (2005) menjelaskan

bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- 6) Disposisi implementor

f. Model *G. Shabbir Cheema* dan *Dennis A. Rondinell*

Cheema dan *Rondell* dalam Subarsono (2008) menggambarkan 4 kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program antara lain:

- a. kondisi lingkungan ,
- b. hubungan antar organisasi,
- c. sumber daya organisasi untuk implementasi program,
- d. karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
- e.

g. Model *Soren C. Winter*

Winter dalam *Peters* dan *Pierre* memperkenalkan model implikasi integratif (*integrated implikation model*). *Winter* berpendapat bahwa keberhasilan implimentasi kebjakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya *winter* mengemukakan 3 variabel yang mempengaruhi proses implementasi yakni:

- a. Perilaku hubungan antar organisasi
Dimensinya adalah komitmen dan organisasi antar organisasi
- b. Perilaku kelompok sasaran
Kelompok sasaran tidak hanya mempengaruhi pada dampak kebijakan tetapi juga berpengaruh kinerja aparat tingkat bawah,
- c. Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah

Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berkesimpulan akan menggunakan model Model *Van Meter* dan *Van Horn*, dikarenakan dapat mengetahui kelompok *variabel* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sehingga peneliti dapat mendeskripsikan, membantu menentukan peneliti mencari nilai-nilai *variabel* kebijakan yang terkontrol sehingga akan menghasilkan manfaat yang terbesar dari nilai sebagai variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan dan dengan menggunakan model verbal melalui nalar dan dieksresikan dalam bahasa sehari-hari untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan model kebijakan yang dibuat para pembuat kebijakan.

4. Konsep Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan

anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilain yang sesuai. Pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga jenjang menurut tingkatannya, dimana dalam setiap jenjang mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Ketiga jenjang pendidikan tersebut adalah:

1) Pendidikan Dasar

Menekankan penguasaan kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Ateri pendidikan dasar mengutamakan pembekaan keampuan yang fungsional untuk kehidupan dalam berbagai bidang sosia, budaya, ekonomi dengan berbasis pada nilai-nilai moral.

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah dibedakan menjadi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Tujuan utama pendidikan menengah umum adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan tujuan utama pendidikan menengah kejuruan adalah mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi menekankan pada peningkatan mutu dan relevansi, baik untuk program-program yang bersifat akademik maupun kcahlian (profesional).

Pendidikan dalam era global dapat dilihat pemerintahan komunisme dan maraknya demokrasi. Gelombang globalisasi membawa masalah-masalah baru dalam proses pendidikan antara lain di satu pihak

pemerintah menganggap pendidikan sebagai salah satu tulang punggung utama dari perkembangan masyarakat, di lain pihak campur tangan pemerintah terhadap pendidikan nasional semakin berkurang. Berbagai kebijakan pendidikan yang bemuansa internasional mulai lahir seperti sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah bertaraf internasional, pelatihanpelatihan internasional dan dan berbagai bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan, misalnya, delapan tujuan dari perkembangan dunia (*Milenium Development*) menurut PBB yang di kutip dari Tilaar (2008: 304), yaitu :

- a. Penghapusan kemiskinan
- b. Pendidikan untuk semua
- c. Persamaan gender
- d. Perlawanan terhadap penyakit HIV/AIDS, malaria, dan sebagainya.
- e. Penurunan angka kematian anak
- f. Peningkatan kesehatan ibu
- g. Pelestarian lingkungan hidup
- h. Kerjasama global

Sedangkan Muharjo (2001: 3-16) membagi definisi pendidikan menjadi 3, yaitu:

1) Definisi luas

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman berlangsung daam segala lingkungan dan sepanjang hidup.

Karakteristik konsep ini, yaitu:

- a. Masa pendidikan seumur hidup selama ada pengaruh lingkungan .
- b. Lingkungan pendidikan dapat diciptakan maupun ada dengan sendirinya.
- c. Kegiatan dapat berbentuk tak sengaja ataupun terprogram.
- d. Tujuan pendidikan tidak ditentukan dari luar, tetapi terkadang dalam tiap pengalaman belajar, tidak terbatas dan sama dengan tujuan hidup.
- e. Didukung oleh kaum humanis, romantik dan kaum pragmatik.

2) Definisi sempit

Pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Karakteristik konsep ini yaitu:

- a. Masa pendidikan terbatas
- b. Lingkungan pendidikan diciptakan khusus
- c. Isi pendidikan tersusun secara terprogram dalam bentuk kurikulum, kegiatan pendidikan berorientasi kepada guru dan kegiatan terjadwal.
- d. Tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar, terbatas pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu, bertujuan untuk mempersiapkan hidup.
- e. Didukung oleh kaum *Behavioris*.

3) Definisi luas terbatas

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.

Karakteristik konsep ini, yaitu:

- a. Masa pendidikan berlangsung seumur hidup yang kegiatannya tidak berlangsung sembarang, tetapi pada saat tertentu.
- b. Berlangsung dalam sebagian lingkungan hidup (kultur)
- c. Berbentuk pendidikan formal, informal dan non formal
- d. Tujuan pendidikan adalah sebagai kesehagian dari tujuan hidup yang bersifat menunjang terhadap pencapaian tujuan hidup.
- e. Didukung oleh kaum humanis, realistik dan realisme kritis.

Di Indonesia dikenal 3 jenis pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan di sekolah ini secara ini secara micro diartikan sebagai kelanjutan pendidikan keluarga, karena tanggung jawab utama keluarga pada segi kehidupan. Sedang arti pendidikan di sekolah secara makro adalah pendidikan masyarakat dan negara..
2. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan Keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional.
3. Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal melalui hasil proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecaapan hidup, pendidikan usia dini, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

2) Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian Setiyawan, Saleh, Hayat, (2012) tesis yang berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). Pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang layak dan bermutu, Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada: (1) Penetapan penerima BPMKS sudah berjalan sesuai dengan peraturan. (2) Pengalokasian dana BPMKS sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. (3) Laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan. (4) Monitoring terhadap penggunaan dana BPMKS sudah dilakukan dengan baik. (5) Hasil implementasi BPMKS sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan. Namun ditemui beberapa kendala yaitu komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan BPMKS, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, pencairan dana terlambat, dan belum ada unit yang secara khusus menangani BPMKS. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.

2. Desertasi Baedhowi berjudul Implementasi kebijakan otonomidaerah bidang pendidikan : studi kasus di kabupaten Kendal dan kota Surakarta. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan layanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik bersifat koliseptual maupun masalah faktual.

Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan membawa dampak negatif yang lebih kompleks seperti masalah disintearasi bangsa. Itulah sebabnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonomi daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang "implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten/Kota".Cakupan penelitian ini meliputi faktor *Translation ability* para pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi,

pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, diadopsi dari Teori *Gerston* (2002).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji prospek implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau naturalistik karena peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah, menggunakan metode kualitatif maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya, melalui metode kualitatif dapat pula ditemukan informasi yang bersifat perasaan, norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut dari seseorang maupun kelompok orang.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan:

Pertama dilihat dari perspektif *policy initiation*, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara obyektif oleh analisis kebutuhan (*need analysis*) dalam pemecahan masalah publik tetapi lebih ditentukan oleh itemst para aktor penentu kehijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Proses pengambilan keputusan yang berlaku sampai saat ini cenderung herakibat pada kurang relevannya kehijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik, aktor utama Bupati/Walikota dan Komisi E DPRD, jauh lebih dominan dan saling mempengaruhi dalam penetapan kebijakan, dibanding aktor pelaksana

kebijakan yaitu Dinas Pendidikan. Dalam penetapan dan implementasi kebijakan, public belum dilibatkan dan diberdayakan, serta belum dimobilisasi secara signifikan.

Kedua, kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dipandang dari konsep "*translation ability*" belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Para pegawai Dinas Pendidikan memiliki rata-rata latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan latar belakang pekerjaan yang cukup relevan namun posisi tawar (*bargaining position*) dari Dinas Pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD. Sebaliknya, aktor utama (Bupati/Walikota dan DPRD) yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan latar belakang pekerjaan yang kurang relevan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang tidak seimbang mengakibatkan adanya *imbalance structure* dalam proses interaksi antar-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam penentuan maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas, yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan di bidang pendidikan.

Ketiga, organisasi dan manajemen sebagai *support system* belum dapat memberikan fasilitas terhadap berjalannya implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagai sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan daripada sebagai mitra sejajar yang

tugasnya melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan agar semakin berkualitas. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara kebijakan publik, aparatur pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*demand driven*) tetapi lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintahan. Perbedaan nomenklatur nama dinas dan struktur organisasi menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar Kabupaten/Kota, dengan pemerintah propinsi, serta pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas institusi.

Keempat, penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya bervariasi antara kedua daerah otonom tersebut. Pemerintah Kendal mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dibanding anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Surakarta. Jika dilihat pemanfaatannya, masih cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik.

Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi implementasi kebijakan pendidikan baik di Kabupaten Kendal maupun Kota Surakarta secara minimal terpenuhi tetapi tidak didukung dengan biaya perawatan yang memadai. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten dan menarik di kedua daerah tersebut, bahwa pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru lebih murah daripada pengajuan anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada.

Keenam, Indonesia sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu pertimbangan mendasar adalah bahwa tidak mungkin pemerintah mengurus pemerintahan sendiri tanpa membagi kewenangan, dan sekaligus tanggung jawab dengan pemerintah daerah, juga dengan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.

Hasil penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut : Bagi pemerintah : pertama untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah, kedua, untuk mengurangi "beban" pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan otonomi daerah bidang pendidikan, perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan dan tanggung jawab bidang pendidikan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, sesuai dengan *translationability* dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu kewenangan Kabupaten/Kota yang perlu dipertimbangkan kembali adalah kewenangan yang terkait dengan rekrutmen guru.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota, agar implementasi kebijakan otonomi daerah lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kedua, agar implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan

dengan bidang pendidikan, dalam pengangkatan atau pengisian jabatan masing-masing aktor kebijakan di daerah,

ketiga, untuk mempercepat implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan pemerintah daerah perlu memiliki program-program aksi, antara lain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan *translation ability*, penataan struktur organisasi dan manajemen, dan peningkatan anggaran pendidikan.

Bagi peneliti : peneliti perlu melakukan kajian dan uji coba lebih lanjut dengan menggunakan alternatif pendekatan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten/Kota, yaitu: (1) politik, (2) *translation ability*, (3) komitmen, (4) kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, (5) organisasi dan manajemen, (6) dana penunjang, (7) sarana dan prasarana, (8) Budaya dan karakteristik masyarakat, dan (9) kepastian hukum dan undang-undang yang menjadi dasar implementasi.

3. Hasil penelitian dari Susanti dan Indah Supardi (2014), tesisnya yang berjudul Studi Implementasi Program Pendidikan gratis di tanah Toraja, *Studies Implementation of Free Education Program In Tana Toraja*. Penelitian ini melihat implementasi dari faktor konten/isi dan konteks kebijakan. Dimana konten/isi kebijakan terdiri atas kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang

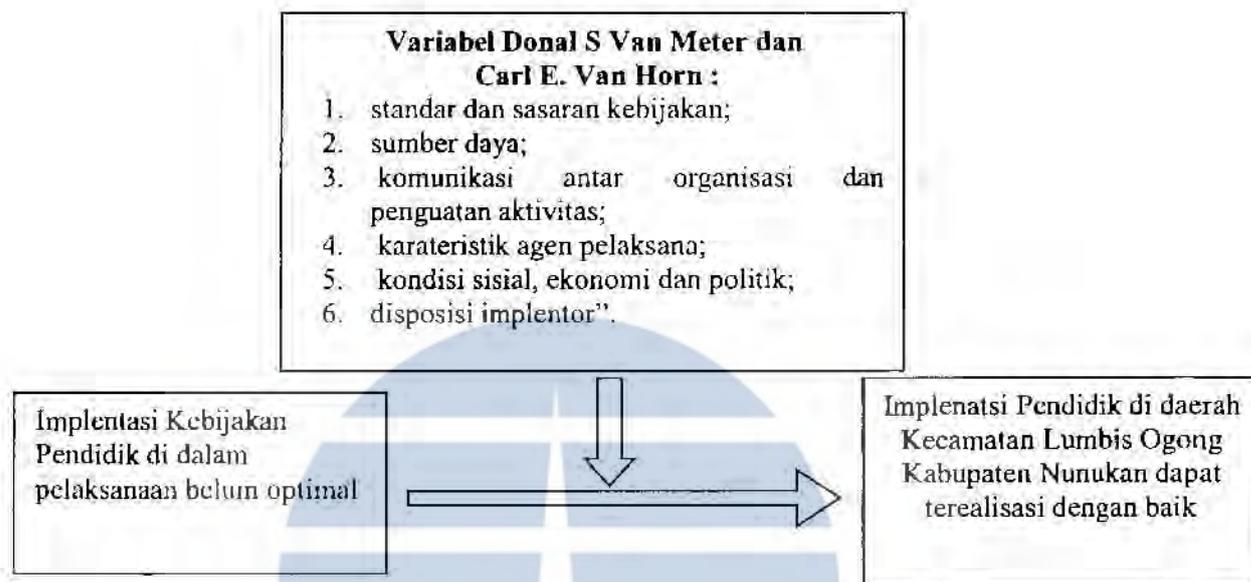
dilibatkan sedangkan dari konteks kebijakan terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa program pendidikan gratis ini berjalan dengan baik walau masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif.

B. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah penelitian yang digambarkan dengan skema secara *holistik* dan sistematis. Kerangka berfikir tentang Implementasi kebijakan pendidikan (Studi kasus di Lumbis Ogong) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan paparan latar belakang dan masalah penelitian di atas, serta analisa penyelesaian permasalahan kegagalan mutu pendidikan di Lumbis Ogong. Adapun analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mendiskripsikan sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan teori *Van Meter dan Van Horn* yang menyatakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu: “standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik; *disposisi implentor*”.

**Bagan 2.1. Implementasi Kebijakan di Daerah Perbatasan
(Studi Kasus di Kec. Lumbis Ogong)**



Sumber: Donald S Van Meter dan Carl E Van Horn

C. Operasional Konsep

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Pendidikan Di Kecamatan Lumbis Ogong sebagai daerah yang berada diwilayah III untuk menjaga kualitas pendidikan
2. Sumber daya yaitu sebagai daya dukung untuk menjaga kebijakan terimplementasi sesuai dengan program pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Nunukan melalui dinas pendidikan
3. Komunikasi atau koordinasi merupakan fungsi penting untuk mengimplementasikan kebijakan dalam internal organisasi pendidikan maupun koordinasi dengan satuan kerja lainnya SKPD

4. Keberagaman program dalam implementasi kebijakan pendidikan di kabupaten Nunukan mempunyai karakteristik yang cukup beragam
5. Kebijakan pendidikan di kabupaten untuk khususnya di kecamatan Lumbis Ogong tidak terlepas dari kondisi sosial, budaya dan masyarakat
6. Kemampuan implementasi dinas pendidikan dalam merealisasikan program menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan di kecamatan lumbis ogong



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Seperti yang sudah dipaparkan pada BAB Pendahuluan, bahwa Peneliti menitikberatkan pada bagaimana implementasi kebijakan pendidikan daerah perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dalam penelitian ini secara jelas dan rinci, Peneliti dapat memperoleh data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya mengenai sesuatu, keadaan atau fenomena sosial tertentu guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan agar dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan pendidikan di daerah Lumbis Ogong.

Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang nampak atau kelihatan. Menurut Sugiyono (2010:15) metode kualitatif sering disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*). Pendekatan kualitatif memandang realita sosial sebagai sesuatu yang utuh atau holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan yang bersifat interaktif.

Menurut Moleong (2007 : 6) "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah". Data yang dikumpulkan merupakan data yang sebenarnya yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti sesuai dengan keadaan di lapangan. Untuk itu, Peneliti langsung ke lapangan dan mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pendidikan di Lumbis Ogong guna meningkatkan mutu pendidikan.

Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pendidikan daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong tunjangan Kabupaten Nunukan. Menurut Danim (2002:54) penelitian kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

Subjek penelitian yang diperoleh peneliti berasal dari berbagai sumber, yaitu: UPT DISDIK Kec. Lumbis, Bpk Achmady, S.Pd; Camat Lumbis Ogong Bpk. Dauth S.Pd; Kepala SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Deviano Sambo, S.Pd; Komite SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Budi Kaluan; Kepala SDN 003 Tukulon Bpk Samsi, S.Pd.

Rancangan studi kasus ini digunakan untuk mempertahankan keutuhan dari objek penelitian, yaitu data yang dikumpulkan sebagai suatu keseluruhan yang berintegrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan daerah perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Untuk itu peneliti akan lebih cermat memberikan pertanyaan yang berkonsentrasi pada fokus masalah yang

diteliti, bersikap netral dan obyektif serta mampu mendeskripsikan rancangan studi kasus dengan baik.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti memfokuskan pada konteks masalah Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah Perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, serta faktor – faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung sehingga data yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dalam Penelitian ini melibatkan UPT DISDIK Kec. Lumbis, Bpk Achmady, S.Pd; Camat Lumbis Bpk. Daudt S.Pd; Kepala SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Deviano Sambo, S.Pd; Komite SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Budi Kaluan; Kepala SDN 003 Tukulon Bpk Samsi, S.Pd.

Peneliti memilih lokasi Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan karena :

1. Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan termasuk dalam wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar)
2. Masih minimnya Sumber daya dan kelengkapan sarana prasarana sekolah yang dimiliki oleh SD dan SMP yang berada di wilayah daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan sekaligus sebagai perencana perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsiran data serta menjadi palapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan untuk memperoleh data dan informasi penelitian yang akurat dan mendalam. Dalam pengumpulan data-data peneliti membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian), yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan informan yang berasal dari UPT DISDIK Kec. Lumbis, Bpk Achmady,S.Pd; Camat Lumbis Bpk. Daudt S.Pd; Kepala SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Deviano Sambo,S.Pd; Komite SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Budi Kaluan; Kepala SDN 003 Tukuton Bpk Samsi, S.Pd.

2. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subyek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subyek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

E. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Menurut Faisal (1990:45). Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

Variasi informan digunakan dalam penelitian ini agar tidak terbatas pada sekelompok individu yang seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi biasa. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Guru SD – SMP di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.
2. Kepala dan staf UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.
3. Kepala dan staf Dinas Pendidikan Kebudayaan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan

Dari informan inilah diharapkan data akan terkumpul. Penetapan mereka sebagai informan didasarkan pada alasan bahwa merekalah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah Perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat tertentu. Untuk dapat memecahkan permasalahan dengan tuntas dalam melaksanakan penelitian

diperlukan data yang *valid* dan *reliabel*. Sedangkan untuk mendapatkan data yang *valid* dan *reliable*, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mencatat peristiwa yang diselidiki. Hasil dari kegiatan observasi ini dicatat dalam bentuk kata-kata inti yang seharusnya dikembangkan dalam bentuk laporan.

2. Wawancara

Sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif adalah manusia dalam posisi sebagai nara sumber atau informan untuk memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Moleong (2007: 186) "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu". Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Data yang dikumpulkan dari wawancara merupakan data penguat bagi penentuan data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi, sekaligus data-data lain yang diperlukan untuk mendukung penjelasan tentang permasalahan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada. Analisis dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan bersifat alamiah yaitu sesuai dengan konteks lahiriah tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain dokumen dari sekolah yang meliputi dokumen mengenai keadaan umum sekolah, data siswa, data guru, sarana dan prasarana, kegiatan-kegiatan di daerah Lumbis Ogong serta data penunjang lainnya.

Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah, seperti yang diungkapkan oleh *Lincoln dan Guba* dalam (Moleong, 2014:11) yaitu:

- a. Dokument dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- c. Sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks
- d. Relatif murah dan mudah diperoleh
- e. Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

G. Penyajian Data

Penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis yang dibuat sebelum penelitian. Proses analisis data dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan dengan proses pengumpulan data. Menurut *Bogdan dan Biklen* dalam Moleong (2007: 248) mengemukakan bahwa:

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan hekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dicari kepada orang lain.

Analisis data adalah proses urutan data dengan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan uraian dasar. Sutopo (2002: 94) menyebutkan “Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen

pokok yaitu, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan". Namun demikian, dalam prosesnya peneliti bergerak dalam empat langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Langkah-langkah yang dipakai dalam model analisis interaktif adalah:

1. Pengumpulan Data

Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan angka-angka. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lebih lanjut.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah menjadi hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *field note*. Sutopo (2002: 92) berpendapat, "Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan".

3. Penyajian Data

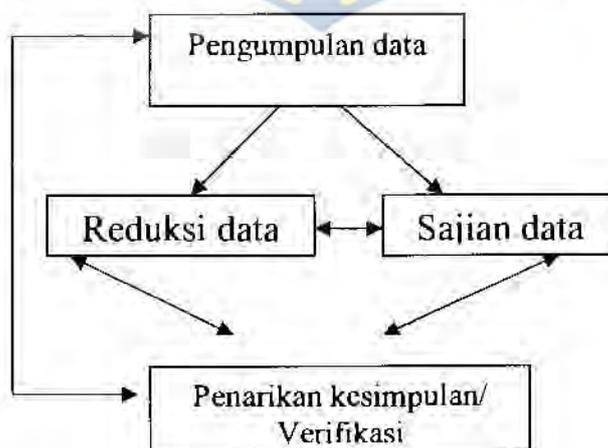
Penyajian data atau *display data* merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang diperoleh dari penelitian yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Sajian data dilakukan dengan

mengorganisasikan informasi secara logis dan sistematis serta mendeskripsikan kedalam bentuk narasi sehingga mudah dibaca dan dipahami untuk selanjutnya memungkinkan peneliti membuat analisis data dan melakukan penarikan kesimpulan.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Data diperoleh peneliti di lapangan mulai dilakukan penarikan kesimpulan sementara sejak penelitian dimulai, untuk itu perlu dicari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari wawancara pengamatan, dan dokumen kesimpulan akan menjadi lebih kuat. Kesimpulan dibuat lebih mantap dan dapat dipertanggung-jawabkan, maka perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan kembali dengan tujuan pemantapan kesimpulan dengan cara penelusuran kembali data dengan cepat sehingga penelitian dapat mengubah kesimpulan sementara yang telah dibuat menjadi kesimpulan akhir yang lebih mantap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 3. 1. Model Analisis Interaktif Data



sumber: Sutopo (2002: 96)

Berdasarkan gambar di atas, maka proses data diawali sejak kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Setelah memperoleh data dari lapangan maka peneliti segera melakukan reduksi data dan penyajian data. Sajian data tersebut dapat dilakukan penarikan suatu kesimpulan. Kesimpulan yang telah dibuat dapat kembali dilakukan verifikasi untuk lebih memantapkan hasil penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap dengan cara pengumpulan data kembali.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadaan Pendidikan di Kecamatan Lumbis Ogong

Pendidikan merupakan aspek utama dalam suatu negara yang berguna untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi zaman yang semakin maju dan modern. Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong yang merupakan wilayah perbatasan dan merupakan salah satu wilayah garis terdepan negara Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Sabah Malaysia, memiliki sarana pendidikannya masih memprihatinkan dari segi mutu pendidikannya, kualitas dan jumlah tenaga pengajar serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan proses belajar dan mengajar antara siswa dan guru akan berjalan secara maksimal jika didukung dengan sistim pendidikan yang terstruktur dengan baik. Namun, sistim pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong belum sepenuhnya terpenuhi secara menyeluruh. Salah satu yang merupakan penyebabnya adalah akses jalan atau transportasi menuju ke Lumbis Ogong hanya dapat di lalui melalui satu jalur yaitu lewat jalur sungai, dan biaya yang diperlukan untuk bisa sampai ke tempat tujuan tergolong mahal.waktu tempuh pun bisa mencapai 3 sampai 8 jam. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan ini hanya pada tingkat SD dan SMP, sedangkan SMA/SMK belum ada. Karena belum tersedianya tingkat pendidikan menengah atas, maka anak-anak yang berada di wilayah ini harus melanjutkan pendidikannya di luar kecamatan Lumbis Ogong. Misalnya bersekolah di wilayah Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, atau di Tarakan.

Bahkan ada di antara mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena terbentur dengan faktor ekonomi keluarga. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pencapaian mutu pendidikan, bagaimana Kecamatan Lumbis Ogong dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas jika sarana pendidikannya masih sangat memprihatinkan.

2. Keadan Pendidikan di Daerah Perbatasan Lumbis Ogong

Perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dengan fungsi utama mempertahankan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wajah terdepan Indonesia yang sangat nampak saat ini adalah dari segi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan jembatan dan benteng pertahanan bagi semua manusia dalam menjalani hidup karena pendidikan sebagai bekal utama kehidupan, dengan tujuan menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Maka dari itu pendidikan diperlukan oleh seluruh warga negara agar setiap orang bisa membangun dan mengembangkan daerahnya.

Sebagai baris terdepan negara Indonesia yang termasuk daerah 3T (daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), pendidikan menjadi agenda penting yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah di tingkat kecamatan. Kecamatan Lumbis Ogong yang merupakan daerah perbatasan dengan negara Malaysia, memegang peranan penting dalam melahirkan SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan yang mempunyai daya jual tinggi, lewat pendidikan yang

digelutinya. Kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa ditentukan oleh generasi-generasi muda yang mampu dan bisa untuk berjuang di jaman modernisasi sekarang ini.

Namun pada kenyataannya Peneliti menemukan, potret pendidikan yang ada di daerah perbatasan Lumbis Ogong sangat berbanding terhalik dengan kenyataan yang diharapkan. Pendidikan yang seharusnya dinikmati dengan mudah oleh anak-anak di daerah Lumbis Ogong ternyata tidak semudah yang dibayangkan. "Dianaktirikan", mungkin itu kata yang cocok disandingkan kepada anak-anak kita yang adadi daerah tersebut. Bagaimana tidak, kesenjangan pendidikan yang terjadi, dimana mutu pendidikan di Lumbis Ogong sangat jauh berbeda dengan pendidikan di daerah-daerah lainnya atau dengan pendidikan yang ada di daerah perkotaan. Mutu pendidikan di Lumbis Ogong masih dikatakan "rendah", baik itu dari segi sarana dan prasarana pendidikan maupun dari tenaga pengajarnya.

Berbagai persoalan pendidikan yang ada di daerah perbatasan tidak terlepas dari buruknya sistem pendidikan. Pemerataan pendidikan yang tidak merata menjadikan daerah perbatasan Lumbis Ogong jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Ketidaklengkapan sarana dan prasaran pendidikan serta tenaga pengajar yang berkualitas membuat pendidikan di daerah tersebut tidak dapat mewujudkan daerah garis terdepan Indonesia yang unggul disegala bidang. Kondisi pendidikan yang memprihatinkan tidak akan mampu melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Sudah seharusnya pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kecamatan bergerak cepat, menemukan solusi yang tepat dan tidak tinggal diam di tempat melihat pendidikan yang

memprihatinkan. Sungguh berbahagianya anak-anak kita di di daerah Perbatasan Lumbis Ogong jika mereka mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu merasakan pendidikan yang layak, yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

3.Sarana dan Prasarana Pendidikan di Daerah Lumbis Ogong

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dengan tujuan memberikan pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya agra dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yaang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Upaya meningkatkan mutu dunia pendidikan sangat diperlukan guna menghasilkan sumberdaya yang handal dan mandiri., serta inampu dalam menghadapi perkembangan IPTEK dan tanggap terhadap perkembangan.

Oleh karena itu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualiatas dari kuantitas sumber daya manusia. Sarana pendidikan yang menunjang proses pendidikan meliputi semua fasilitas secara langsung yang dipergunakan, seperti; gedung sekolah dan asrama guru, ruang belajar, atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi dan sebagainya. Sedangkan prasarana meliputi semua fasilitas secara tidak langsung, seperti; halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di alam pelayanan publik dalam hal ini dalam dunia peendidikan, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka

semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana (Ainamulyana,2015,Sarana dan prasaan Sekolah, <https://ainimulyana.blogspot.com/2015/03/sarana-dan-prasarana-sekolah.html>, diakses tanggal 12 Mei 2018)

Namun pada kenyataannya, Peneliti menemukan bahwa, kondisi pendidikan di daerah perbatasan Lumbis Ogong masih sangat memprihatinkan, sarana dan prasarananya yang dimiliki masih belum memadai. Ketidaktengkapan sarana dan prasarana membuat sistem pendidikan di daerah perbatasan berjalan dengan tidak lancar. Kerusakan pada beberapa ruangan kelas yang belum diperbaiki, kekurangan buku-buku penunjang atau buku cetak bagi guru dan siswa, belum tersedianya fasilitas olahraga; Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa. Selain itu juga kurang ketersediaan tenaga pengajar untuk guru ASN. Belum ada pemerataan penempatan guru ASN untuk setiap sekolah di daerah perbatasan. Hal ini juga berpengaruh pada pendidikan di sebuah sekolah karena membutuhkan tenaga pengajar yang berkompeten menguasai bidang pendidikan yang digelutinya. Selain itu, medan atau perjalanan yang ditempuh oleh pelajar maupun guru cukup jauh. Lokasi menuju sekolah adayang melewati hutan dan melalui sungai. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di daerah perbatasan Lumbis Ogong. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada membuat ruang gerak guru dan siswa menjadi sempit dalam mengeksplor ilmu yang di miliki atau di dapat.

Sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran sangatlah penting bagi guru dan siswa. Semakin lengkap serta memadai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan, maka akan memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Peneliti menemukan bahwa, kondisi sarana dan prasarana yang di daerah perbatasan jauh berbeda fasilitasnya dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah lain atau di daerah-daerah perkotaan. Kemewahan fasilitas sarana dan prasarana sekolah tidak ditemukan di daerah tersebut. Gedung atau ruangan kelas didapati ada yang berlubang, atap yang bocor, kekurangan buku-buku paket, kekurangan fasilitas olahraga, dan lain-lain. Posisi yang paling terdepan, pendidikan yang paling terbelakang, itulah wajah pendidikan sebenarnya yang ada di daerah perbatasan Lumbis Ogong.

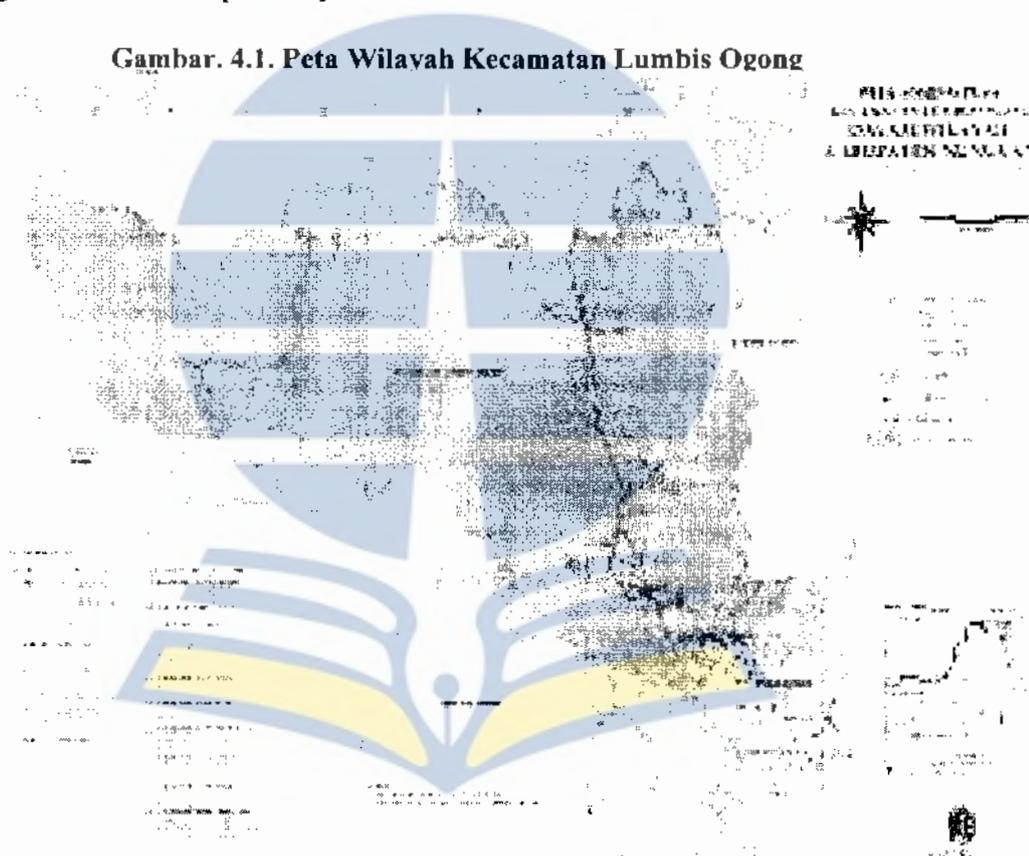
Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di daerah perbatasan yang merupakan beranda terdepan negara Indonesia. Bukan hanya di kota-kota besar yang memiliki akses ternudah dan tercepat dalam beraktivitas, masyarakat yang berada di daerah perbatasan juga harus lebih diperhatikan kebutuhannya dari segi pendidikan.

3. Kondisi sosial budaya dan perekonomian di Lumbis Ogong

Kondisi sosial budaya Kecamatan Lumhis Ogong sebagian besar di huni oleh Suku Dayak Agabag, Suku Dayak Tahol, dan Suku Dayak Lundayeh yang mendiami sepanjang Sungai Sedalit dan Sungai Sembakung yang menganut agama Kristen dan Katolik. Pada Umumnya masyarakat Lumbis Ogong masih kuat memegang tradisi nenek moyang. Hal ini nampak pada tradisi gotong royong,

musyawarah, pernikahan, ataupun acara kematian dan lain - lain. Masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat daripada hukum negara dalam menyelesaikan permasalahan. Kegiatan pada sektor perekonomian di Kecamatan Lumbis Ogong sebagian besar adalah sektor pertanian dan perkebunan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat masih banyak tergantung dengan produk – produk dari Malaysia, karena akses ke Malaysia lebih mudah, baik dari segi transportasi maupun biaya

Gambar. 4.1. Peta Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong



Sumber : Kantor Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2016

Tabel 4. 2. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Tahun 2016

No	Kecamatan	Sekolah		Murid		Guru		Rasio murid - guru	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Lumbis Ogong	10	3	823	163	72	13	11,43	12,54

Sumber : Dinas Pendidikan Nunukan (Dapodik 2016)

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nunukan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi dilaksanakan juga oleh pihak swasta. Partisipasi pihak swasta ini sangat membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan hingga ke segenap penjuru pelosok daerah. Sehingga diakhir Tahun 2016, sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: KB/TPA/SPS/PAUD Negeri maupun swasta berjumlah 139 unit dengan jumlah siswa 3.483 orang, SD/Mi Negeri maupun swasta 144 unit dengan jumlah siswa 23.614 orang, SMP Negeri maupun swasta berjumlah 51 unit dengan jumlah siswa 9.347 orang, serta SMA/SMK Negeri dan swasta berjumlah 28 unit dengan jumlah siswa 7.064 orang.

4. Gambaran Umum Pendidikan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Pendidikan merupakan aspek utama dalam suatu negara yang berguna untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi zaman yang semakin maju dan modern. Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong yang merupakan wilayah perbatasan dan merupakan salah satu wilayah garis terdepan negara Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Sabah Malaysia, memiliki sarana pendidikannya masih memprihatinkan dari segi mutu

pendidikannya, kualitas dan jumlah tenaga pengajar serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan proses belajar dan mengajar antara siswa dan guru akan berjalan secara maksimal jika didukung dengan sistim pendidikan yang terstruktur dengan baik. Namun, sistim pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong belum sepenuhnya terpenuhi secara menyeluruh. Salah satu yang merupakan penyebabnya adalah akses jalan atau transportasi menuju ke Lumbis Ogong hanya dapat di lalui melalui satu jalur yaitu lewat jalur sungai, dan biaya yang diperlukan untuk bisa sampai ke tempat tujuan tergolong mahal.waktu tempuh pun bisa mencapai 3 sampai 8 jam. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan ini hanya pada tingkat SD dan SMP, sedangkan SMA/SMK belum ada. Karena belum tersedianya tingkat pendidikan menengah atas, maka anak-anak yang berada di wilayah ini harus melanjutkan pendidikannya di luar kecamatan Lumbis Ogong. Misalnya bersekolah di wilayah Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, atau di Tarakan. Bahkan ada di antara mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena terhentur dengan faktor ekonomi keluarga. Hal ini mengakibatkan ketidakscimbangan dalam pencapaian mutu pendidikan, bagaimana Kecamatan Lumbis Ogong dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas jika sarana pendidikannya masih sangat memprihatinkan.

a. Data Jumlah SD, SMP dan Tenaga Pengajar di Daerah Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 4.3. Data Siswa SD Kecamatan Lumbis Ogong Tahun Ajaran 2017/2018

NO	NAMA SEKOLAH Inisial	JUMLAH SISWA												TOTAL
		KELAS I		KELAS II		KELAS III		KELAS IV		KELAS V		KELAS VI		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	A	17	4	10	12	12	8	3	4	9	8	12	6	105 Siswa
		Jumlah = 21		Jumlah = 22		Jumlah = 20		Jumlah = 7		Jumlah = 17		Jumlah = 18		
2	B	18	9	10	3	9	9	6	13	3	6	3	3	92 Siswa
		Jumlah = 27		Jumlah = 13		Jumlah = 18		Jumlah = 19		Jumlah = 9		Jumlah = 6		
3	C	15	16	10	4	10	9	4	5	10	6	6	6	101 Siswa
		Jumlah = 31		Jumlah = 14		Jumlah = 19		Jumlah = 9		Jumlah = 16		Jumlah = 12		
4	D	11	7	9	7	7	7	8	3	5	4	3	6	74 Siswa
		Jumlah = 18		Jumlah = 16		Jumlah = 14		Jumlah = 11		Jumlah = 9		Jumlah = 6		
5	E	6	6	6	3	7	8	7	4	5	7	2	1	62 Siswa
		Jumlah = 12		Jumlah = 9		Jumlah = 15		Jumlah = 11		Jumlah = 12		Jumlah = 3		
6	F	11	7	6	9	8	3	-	6	8	3	8	7	76 Siswa
		Jumlah = 18		Jumlah = 15		Jumlah = 11		Jumlah = 6		Jumlah = 11		Jumlah = 15		
7	G	5	6	11	6	11	10	9	10	11	10	12	7	108 Siswa
		Jumlah = 11		Jumlah = 17		Jumlah = 21		Jumlah = 19		Jumlah = 21		Jumlah = 19		
8	H	11	5	6	7	6	3	11	4	4	5	3	4	69 Siswa
		Jumlah = 15		Jumlah = 13		Jumlah = 9		Jumlah = 15		Jumlah = 9		Jumlah = 7		
9	I	3	4	14	14	19	15	4	5	6	4	4	8	100 Siswa
		Jumlah = 7		Jumlah = 28		Jumlah = 34		Jumlah = 9		Jumlah = 10		Jumlah = 12		
10	J	11	8	6	1	3	5	5	3	5	9	5	4	65 Siswa
		Jumlah = 19		Jumlah = 7		Jumlah = 8		Jumlah = 8		Jumlah = 14		Jumlah = 9		
Total Keseluruhan Jumlah Siswa SD di Kecamatan Lumbis Ogong adalah 852 Orang													852 Siswa	

Sumber : UPT DISDIK Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong 2017

Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------|
| A. SDN 001 Tao Lumbis, Desa Tao Lumbis | F. SDN 006 Ubol, Desa Ubol |
| 1. SDN 002 Sedalid, Desa Sedalid | G. SDN 007 Binter, Desa Binter |
| 2. SDN 003 Sumantobol, Desa Sumantobol | H. SDN 008 Labang, Desa Labang |
| 3. SDN 004 Suyadon, Desa Suyadon | I. SDN 009 Panas, Desa Panas |
| 4. SDN 005 Tukulon, Desa Tukulon | J. SDN 009 Panas, Desa Panas |

Berdasarkan Tabel 4.3. Tentang data Siswa 10 Unit SD di Kecamatan Lumbis Ogong maka dapat diuraikan sebagai berikut: Jumlah siswa SDN 001 Tao Lumbis 105 orang; laki-laki 63 orang; perempuan 42 orang. Jumlah siswa SDN 002 Sedalid 92 orang; laki-laki 49 orang; perempuan 43 orang. Jumlah Siswa SDN 003 Sumentobol 101 orang; laki-laki 55 orang; perempuan 46 orang. Jumlah siswa SDN 004 Suyadon 74 orang; laki-laki 43 orang; perempuan 31 orang. Jumlah siswa SDN 005 Tukulon 62 orang; laki-laki 33 orang; perempuan 29 orang. Jumlah siswa SDN 006 Ubol 76 orang; laki-laki 41 orang; perempuan 35 orang. Jumlah siswa SDN 007 Binter 108 orang; laki-laki 59 orang; perempuan 49 orang. Jumlah siswa SDN 008 Labang 69 orang; laki-laki 41 orang; perempuan 28 orang. Jumlah siswa SDN 009 Panas 100 orang; laki-laki 50 orang; perempuan 50 orang. Jumlah siswa SDN 010 Long Bulu 65 orang; laki-laki 35 orang; perempuan 30 orang. Jumlah siswa 10 unit SD di Kecamatan Lumbis Ogong, untuk siswa laki-laki 469 orang, perempuan 383 orang. Jadi total keseluruhan jumlah siswa di Kecamatan Lumbis Ogong adalah 852 orang. Hal tersebut itu dapat dijelaskan pada table 4.4 dibawah ini

Tabel. 4.4. Data Siswa SMP di Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong Tahun Ajaran 2017/2018

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA						TOTAL
		KELAS VII		KELAS VII		KELAS VII		
		L	P	L	P	L	P	
1	SMPN 1 Lumbis Ogong Desa Binter	7	10	13	5	10	7	52 Siswa
		Jumlah = 17		Jumlah = 18		Jumlah = 17		
2	SMPN 2 Lumbis Ogong Desa Tau Lumbis	12	6	4	8	9	6	55 Siswa
		Jumlah = 18		Jumlah = 12		Jumlah = 15		
3	SMPN 3 Lumbis Ogong Desa Sedalit	7	7	8	6	3	6	37 Siswa
		Jumlah = 14		Jumlah = 14		Jumlah = 9		
Total Keseluruhan Jumlah Siswa SMP di Kec. Lumbis Ogong Adalah							144 Orang	144 Siswa

Sumber : UPT DISDIK Kecamatan Lumbis Ogong

Berdasarkan Tabel 4.4. Tentang data siswa SMP di Kecamatan Lumbis Ogong, maka dapat diuraikan sebagai berikut: Jumlah siswa SMPN 1 Lumbis Ogong 52 orang; laki-laki 30 oarang; perempuan 22 orang. Jumlah siswa SMPN 2 Lumbis Ogong 55 orang; laki-laki 25 orang; perempuan 30 orang. Jumlah siswa SMPN 3 Lumbis Ogong 37 orang; laki-laki 18 orang; perempuan 19 orang. Jumlah siswa SMP di Kecamatan Lumbis Ogong untuk laki laki 73 orang; perempuan 71 orang. Jadi, total keseluruhan jumlah siswa SMP di Kecamatan Lumbis Ogong adalah 144 orang.

**Tabel. 4.5. Data Guru SD di Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong
Tahun ajaran 2017/2018**

No	Nama Sekolah (Inisial)	Total Jumlah Guru (ASN + Honor)		Guru ASN		Guru Sertifikasi		Guru Honor	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	A	9	1	4	1	3	1	4	-
		Jumlah = 10		Jumlah = 5		Jumlah = 4		Jumlah = 4	
2	B	8	-	3	-	3	-	5	-
		Jumlah = 8		Jumlah = 3		Jumlah = 3		Jumlah = 5	
3	C	12	2	2	2	1	-	10	-
		Jumlah = 13		Jumlah = 4		Jumlah = 1		Jumlah = 10	
4	D	7	-	2	-	1	-	6	-
		Jumlah = 7		Jumlah = 2		Jumlah = 1		Jumlah = 6	
5	E	8	2	4	1	2	1	4	1
		Jumlah = 10		Jumlah = 5		Jumlah = 3		Jumlah = 5	
6	F	9	1	5	-	2	-	4	1
		Jumlah = 10		Jumlah = 5		Jumlah = 2		Jumlah = 5	
7	G	10	2	3	-	-	-	7	2
		Jumlah = 12		Jumlah = 3		Jumlah = -		Jumlah = 9	
8	H	6	3	2	1	2	-	4	2
		Jumlah = 9		Jumlah = 3		Jumlah = 2		Jumlah = 6	
9	I	8	2	3	1	3	-	5	1
		Jumlah = 10		Jumlah = 4		Jumlah = 3		Jumlah = 6	
10	J	5	2	3	-	-	-	2	2
		Jumlah = 7		Jumlah = 3		Jumlah = -		Jumlah = 4	

Sumber : UPT DISDIK Kecamatan Lumbis

Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| B. SDN 001 Tao Lumbis, Desa Tao Lumbis | K. SDN 006 Ubol, Desa Ubol |
| 5. SDN 002 Sedalid, Desa Sedalid | L. SDN 007 Binter, Desa Binter |
| 6. SDN 003 Sumantobol, Desa Sumantobol | M. SDN 008 Labang, Desa Labang |
| 7. SDN 004 Suyadon, Desa Suyadon | N. SDN 009 Panas, Desa Panas |
| 8. SDN 005 Tukulon, Desa Tukulon | O. SDN 010 Long Bulu, Desa Long Bulu |

Sumberdata : UJPT Disdik Lumbis 2017

Berdasarkan Tabel 4.5. Tentang data guru SD di Kecamatan Lumbis Ogong, maka dapat diuraikan sebagai berikut: Jumlah guru di SDN 001 Tao Lumbis 10 orang; laki-laki 9; perempuan 1; guru ASN 5 orang, guru bonorer 5 orang guru

ASN yang sudah sertifikasi 4 orang. Jumlah guru di SDN 002 Sedalid 8 orang; laki-laki 8 orang, perempuan tidak ada; guru ASN 3 orang; guru honorer 5 orang, guru ASN yang sertifikasi 3 orang. Jumlah guru SDN 003 Sumentobol 14 orang; laki-laki 12 orang; perempuan 2 orang; guru ASN 4 orang; guru honor 10 orang, guru ASN yang sudah sertifikasi 1 orang. Jumlah guru SDN 004 Suyadon 7 orang; laki-laki 7 orang; perempuan tidak ada; guru ASN 2 orang; guru honorer 5 orang; guru ASN yang yang sertifikasi 1 orang. Jumlah guru di SDN 005 Tukulon 10 orang; laki-laki 8 orang; perempuan 2 orang; guru ASN 5 orang, guru honorer 5 orang; guru ASN yang sertifikasi 3 orang. Jumlah guru SDN 006 Ubol 10 orang; laki-laki 9 orang; perempuan 1 orang; guru ASN 5 orang; guru honorer 5 orang; guru ASN yang sertifikasi 2 orang. Jumlah guru SDN 007 Binter 12 orang; laki-laki 10 orang; perempuan 2 orang; guru ASN 3 orang; guru honorer 9 orang; guru ASN sertifikasi tidak ada. Jumlah guru di SDN 008 Labang 9 orang; laki-laki 6 orang; perempuan 3 orang; guru ASN 3 orang; guru honorer 6 orang; guru ASN yang sertifikasi 2 orang. Jumlah guru SDN 009 Panas 10 orang; laki-laki 8 orang; perempuan 2 orang; guru ASN 4 orang; guru honor 6 orang, guru ASN yang sertifikasi 3 orang. Jumlah guru SDN 010 Long Bulu 7 orang; laki-laki 5 orang; perempuan 2 orang; guru ASN 3 orang; guru honorer 4 orang; guru ASN sertifikasi 3 orang. Jumlah guru SMP di Kecamatan Lumbis Ogong: untuk guru laki-laki 82 orang; guru perempuan 15 orang; guru ASN 37 orang; guru honorer 60 orang, guru ASN sertifikasi 22 orang. Jadi total keseluruhan jumlah tenaga guru di Lumbis Ogong adalah 97 orang.

Tabel 4.6. Data Guru SMP di Wilayah Kecamatan Lumbis Ogong Tahun Ajaran 2017/2018

No	Nama Sekolah	Total Jumlah Guru ASN + Honor		Guru ASN		Guru Sertifikasi		Guru Honor	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	SMP Negeri 1 Lumbis Desa Binter	4	3	2	2	-	-	2	1
		Jumlah = 7		Jumlah 4		Jumlah = -		Jumlah 3	
2	SMP Negeri 2 Lumbis Desa Tau Lumbis	4	2	2	1	1	-	2	1
		Jumlah = 6		Jumlah = 3		Jumlah = 1		Jumlah 3	
2	SMP Negeri 3 Lumbis Desa Sedalit	5	1	3	1	1	-	2	-
		Jumlah = 6		Jumlah = 4		Jumlah = 1		Jumlah 2	

Sumber : UPT DISDIK Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong 2017

Berdasarkan Tabel 4.6. Tentang data Guru di SMP Lumbis Ogong, maka dapat diuraikan sebagai berikut: Jumlah guru di SMPN 1 Lumbis Ogong 7 orang; laki-laki 4 orang; perempuan 3 orang; guru ASN 4 orang; guru honorer 3 orang; guru ASN sertifikasi tidak ada. Jumlah guru SMPN 2 Lumbis Ogong 6 orang; laki-laki 3 orang; perempuan 3 orang; guru ASN 3 orang; guru honorer 3 orang; guru ASN yang sertifikasi 1 orang. Jumlah guru di SMPN 3 Lumbis Ogong 6 orang; laki-laki 5 orang; perempuan 1 orang; guru ASN 4 orang; guru honorer 2 orang; guru ASN yang sertifikasi 1 orang.

Jumlah guru SMP di Kecamatan Lumbis Ogong: untuk guru laki-laki 13 orang; guru perempuan 6 orang; guru ASN 11 orang; guru honorer 8 orang; guru ASN yang sertifikasi 2 orang. Jadi total keseluruhan jumlah guru SMP di Kecamatan Lumbis Ogong adalah 19 orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dikemukakan oleh *Van Meter dan Van Horn*, suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki standar dan sasaran kebijakan yang terstruktur dan terencana dengan jelas sehingga dapat di pahami oleh individu atau pelaksana kebijakan. Dengan susunan standar dan sasaran yang jelas, maka pelaksana kebijakan juga dapat memahami dengan jelas dan dapat merealisasikan program-program atau kebijakan-kebijakan tersebut. Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan Pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong mengacu pada dasar kebijakan Surat Keputusan Bupati Nunukan No.188.95/51/11/2014 Tgl 3 Februari 2014 “ Tentang sekolah-sekolah yang berada di wilayah khusus. Dengan sasaran yang ditujui adalah pada daerah-daerah terpencil atau pada daerah-daerah-daerah yang termasuk wilayah perbatasan.

Pada daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong terdapat 10 unit Sekolah Dasar(SD) dan 3 unit Sekolah Menengah Pertama. 10 unit SD antara lain: SDN 001 Tao Lumbis berada di desa Lumbis; SDN 002 Sedalid berada di desa Sedalid; SDN 003 Sumantobol herada di desa Sunantobol; SDN 004 Suyadon berada di desa Suyadon; SDN 005 Tukulon berada di desa Tukulon, SDN 006 Ubol berada di desa Ubol; SDN 007 Binter berada di desa Binter; SDN 008 Labang berada di desa Labang; SDN 009 Panas berada di desa Panas dan SDN 010 Long Bulu berada di desa Long Bulu. Kemudian 3 unit SMP antara lain: SMP 1 Lumbis berada di desa Binter; SMP 2 Lumbis berada di desa Tao Lumbis dan SMP 3 Lumbis berada di desa Sedalip.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan daerah perbatasan kecamatan Lumbis Ogong ini mengacu pada landasan hukum yang sudah di putuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Nunukan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan Perempuan dan Anak. Bab III, Bagian Kesatu Paragraf 1, Pasal 4 huruf d “Mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan Perempuan dan Anak. Bab III, Pasal 13 huruf e” Setiap Anak berhak mendapat Pendidikan”.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak. Bab III, Paragraf 4 Tentang Pendidikan Pasal 18 ayat 1” Penyelenggara Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak”.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak. Bab III, Paragraf 4 Tentang Pendidikan Pasal 18 ayat 2” Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi”.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak. Bab III, Paragraf 4 Tentang Pendidikan Pasal 23 “Bagi anak yang tidak menempuh pendidikan formal, dapat menempuh pendidikan, melalui satuan pendidikan nonformal” meliputi: Huruf a” Bagi anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun keatas dan tidak menempuh pendidikan formal SD atau sederajat dapat menempuh pendidikan nonformal Paket a atau setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah(MI)”; Huruf b” Bagi anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas dan tidak menempuh pendidikan formal SMP atau sederajat dapat menempuh pendidikan nonformal Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)”; atau Huruf c” Bagi anak yang telah berusia 21 (dua puluh satu) ke atas dan tidak menempuh pendidikan formal SMP atau sederajat dapat menempuh pendidikan nonformal Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK)”.

(sumber : Wawancara peneliti dengan UPT Disdik Kec. Lumbis Bp Achmady, S.Pd Tgl 12 Pebruari 2018)

Dengan adanya 10 unit SD dan 3 unit SMP yang tersebar di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong, membuktikan bahwa pemerintah sudah menjalankan fungsinya untuk bisa mendirikan gedung sekolah bagi anak-anak di wilayah tersebut, baik itu pemerintah yang ada di desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah tingkat kabupaten. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian

pemerintah atas pemenuhan kebutuhan pendidikan formal anak di wilayah Lumbis Ogong, sejak tahun 1980 SD sudah didirikan dan pada tahun SMP pada tahun 2006. Sekolah didirikan sebagai salah satu wadah atau sarana untuk anak-anak dapat melangsungkan proses pembelajaran dan sebagai tempat pembentuk karakter anak agar kelak dapat menjadi generasi produktif dan berkualitas yang dapat membanggakan tanah kelahirannya di wilayah kecamatan Lumbis Ogong. Hal ini dibenarkan lewat wawancara Penelitidengan UPT DISDIK Kec. Lumbis Bp Achmady, S.Pd, yaitu;

Sejak tahun 1980 dengan adanya program dari pemerintah yang dahulu disebut SD Inpres, hingga saat ini. SD di Kecamatan Lumbis Ogong berjumlah 10 unit. Sejak Tahun 2006 dan hingga kini sekolah SMP ada Tiga Sekolah, Yaitu: SMPN 1 Lumbis Ogong di Desa Binter (Ibukota Kecamatan Lumbis Ogong); SMPN 2 Lumbis Ogong di Desa Tao Lumbis (Daerah Perbatasan Dengan Negara Malaysia Timur, Serawak); SMPN 3 Lumbis Ogong di Desa Sedalid. (Wawancara: Senin, 12 Februari 2018)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah di tingkat kecamatan telah merealisasikan dengan baik pembangunan gedung sekolah di daerah perbatasan yang mengacu pada SK Bupati dan landasan hukum yang dikeluarkan oleh PERDA, sehingga ketepatan standar dan sasaran kebijakan telah sampai pada masyarakat Lumbis Ogong terutama bagi anak-anak yang ingin bersekolah. Seperti yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki standar dan sasaran kebijakan yang terstruktur dan terencana dengan jelas sehingga dapat di pahami oleh individu atau pelaksana kebijakan.

1. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1974;465) menemukan sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan standar dan sasaran kebijakan. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber dana; SDM serta fasilitas atau sarana dan prasarana.

1. Sumber Dana

Teori *Van Meter dan Van Horn*, mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya, dalam hal ini sumber daya keuangan, yang diperuntukan untuk memperlancar segala proses implementasi kebijakan pendidikan, meliputi administrasi; penyediaan dan tunjangan pengajar; bantuan kepada siswa yang kurang mampu dan untuk melengkapi segala kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Kekurangan sumber daya keuangan dapat memperlambat proses implementasi kebijakan pendidikan yang ada.

Sumber dana pendidikan adalah sumber dana yang diterima oleh pihak sekolah, dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat dalam hal ini adalah orang tua siswa. Selain dari pihak pemerintah, sumber dana sekolah dapat juga diperoleh dari penggalangan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah, bantuan dari yayasan atau bantuan dari luar negeri.

Sesuai dengan SK Bupati Nunukan No.188.95/51/11/2014 Tgl 3 Februari 2014 “
Tentang sekolah-sekolah yang berada di wilayah khusus, guru-guru ASN di

wilayah Lumbis Ogong mendapatkan tunjangan khusus perbatasan, sedangkan guru-guru honor diberi tunjangan lewat Pemda Kabupaten yang selama ini pembayaran guru honor dibebankan kepada pihak sekolah melalui dana BOSNAS. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Camat Lumbis Ogong Bpk. Daudt S.Pd ;

Semua guru ASN di Kecamatan Lumbis Ogong mendapatkan Tambahan gaji yaitu tunjangan khusus daerah perbatasan, danada juga beberapa guru honor yang mendapatkan tunjangan tersebut.(Wawancara; Senin 05 Februari2018).

Selain tenaga pengajar, bagi para pelajar yang kurang mampu dimana rata-rata pekerjaan orang tuanya adalah buru tani, juga mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah.

Penerimaan bantuan kepada siswa yang kurang mampu juga dibenarkan oleh Kepala SDN 006 Tukulon Bpk. Samsi, S.Pd, yaitu :

Bantuan kepada siswa kurang mampu diberikan melalui dana BOSDA dan BOSNAS. Bantuan kepada siswa SD. Untuk bantuan BOSDA, 1 orang siswa diberi bantuan Rp.75.000 pertahun. Sedangkan untuk bantuan BOSNAS, 1 orang siswa diberi bantuan Rp 750.000 pertahun.(Wawancara: Rabu, 7 Februari 2018)

Hal yang senada juga dibenarkan oleh kepala SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Devianos Sambo, yaitu :

Pemberian bantuan kepada siwa SMPN 1 Lumbis Ogong diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Bantuan yang didapat berupa dana BOSDA dan BOSNAS. Untuk bantuan BOSDA, 1 orang siswa diberi bantuan Rp 75.000 pertahun. Sedangkan untuk bantuan BOSNAS, 1 orang siswa diberi bantuan Rp 1.000.000 pertahun.(Wawancara: Senin, 12 Februari 2018)

Tujuan dari pemberian pemberian dana BOS adalah :

- a. Menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar dari bebanbiaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- b. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasionak (SBI).

Meringankan beban biaya oprasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta.

Sesuai dari tujuan pemberian dana BOS, maka kewajiban siswa SD dan SMP yang berada di wilayah Lumbis Ogong untuk membayar SPP dihilangkan. hal ini juga mengingat bahwa pekerjaan orang tua murid yang sebagian besar adalah petani.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala SDN 006 Tukulon Bpk.Samsi, S.Pd, Yaitu

Melalui bantuan yang di berikan oleh pihak pemerintah, anak-anak yang mendapat bantuan, dimana rata-rata pekerjaan orang tua adalah buru tani, merasa terbantu dengan adanya bantuan yang diterimanya.
(Wawancara: Rabu, 7 Februari 2018)

Bantuan pendidikan yang diperoleh SD dan SMP di Lumbis Ogong hanya berpusat pada bantuan pemerintah yaitu dana BOS. Bantuan atau sumbangan dana dari pihak lain seperti sumbangan orang tua, yayasan atau pihak luar negeri tidak ada. Jika dilihat, kebutuhan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Lumbis Ogong, bukan hanya berpusat kepada tunjangan guru atau bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Tetapi masih ada kebutuhan lainnya

yang harus dipenuhi. Misalnya, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah luar daerah Lumbis Ogong, SD dan SMP yang ada di daerah Lumbis Ogong masih jauh dari kata memadai untuk kelengkapan fasilitas sarana dan prasarananya.

Hal ini juga diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Devianos Sambo, yaitu :

Masih banyak kebutuhan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah Lumbis Ogong, termasuk juga kami di SMPN 1 Lumbis Ogong. Kebutuhan terkait fasilitas sarana dan prasarana yang belum lengkap. Hal ini membuat kami guru dan siswa terkendala dalam kegiatan proses pembelajaran. Salah satunya adalah ketersediaan buku-buku paket yang sepenuhnya belum dimiliki oleh guru dan siswa. (Wawancara: Senin, 12 Februari 2018)

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber dana yang dimiliki oleh 10 unit SD dan 3 unit SMP di daerah Lumbis Ogong belum memadai, karena hanya berpusat dari BOSDA dan BOSNAS. Dimana masih banyak kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam dunia pendidikan selain sumber daya dana. Karena suatu pendidikan tidak akan berjalan dengan optimal jika tidak ada Sumber Daya Manusiannya. Sumber daya manusia dapat menjalankan fungsinya secara optimal jika dikelola secara optimal juga. Ketika Sumber Daya Manusia dapat dikelola dengan optimal, maka yang menjadi tanggung jawab dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan fungsinya pada lembaga pendidikan yang menjadi naungannya. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan harus mempunyai standar kemampuan yang berkualitas sehingga yang menjadi kebutuhan baik itu

kebutuhan secara individu maupun kelompok dapat terpenuhi. Selain itu, dengan adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan secara khusus dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia secara umum, Dimana sangat diharapkan dapat melahirkan manusia-manusia yang berkualitas, berkreaitif dan berinovatif yang nantinya mampu bersaing di zaman yang semakin berkembang dengan segala perubahan-perubahan yang ada.

Pada lembaga-lembaga pendidikan yang berada di daerah Lumbis Ogong, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini dipaparkan oleh Kepala SMP 1 Lumbis Ogong. Bpk Devianos Sambo. S.Pd, yaitu :

Dalam rekrutmen formasi untuk guru di SMP 1 Lumbis Ogong, banyak yang bermutasi ke daerah Kabupaten Nunukan. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah di daerah kabupaten Nunukan dinilai lebih strategis serta kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih menunjang, jika dibandingkan dengan pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong dimana biaya transformasi yang begitu mahal; fasilitas seperti listrik; komunikasi hp dan internet yang belum ada. (Wawancara: Senin, 12 Februari 2018)

Selain itu juga dalam pelaksanaan kurikulum, belum sepenuhnya berjalan merata dalam pelaksanaan K-13. Hal ini disampaikan oleh SMP 1 Lumbis Ogong. Bpk Devianos Sambo. S.Pd. beliau menyampaikan ;

Di SMPN 1 Lumbis Ogong belum dilaksanakannya K-13, karena jumlah tenaga guru masih minim dan minimnya buku-buku penunjang K-13. (Wawancara: Senin, 12 Februari 2018).

Berdasarkan Tabel 4.5. tentang data guru SD Lumbis Ogong dan Tabel 4.6. Tentang data guru SMP Lumbis Ogong tampak jelas bahwa jumlah guru honorer lebih banyak jika dibandingkan jumlah guru ASN. Dimana dari total jumlah keseluruhan guru SD dan SMP di Kecamatan Lumbis Ogong, guru honorer berjumlah 68 orang sedangkan guru ASN berjumlah 48 orang. Dengan perbandingan jumlah guru ASN dan guru Honorer, menunjukkan bahwa pengangkatan guru ASN belum ada pemerataan di seluruh daerah Lumbis Ogong, dan hal ini juga mempengaruhi kinerja guru dalam menjalankan peranannya di lembaga yang dinaunginya. Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada khususnya. Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial seperti yang diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Guru ASN atau PNS memiliki tugas mengajar yang spesifik sesuai SK yang diterimanya. Sedangkan guru honorer fleksibel, seringkali merangkap karena harus mengganti tugas mengajar guru ASN yang berhalangan

Guru ASN memiliki gaji tetap dan juga tunjangan-tunjangan dari pemerintah yang setiap tahun cenderung naik ditambah lagi gaji ke-13. Sedangkan pada guru honorer tidak ada. Gaji guru honorer di Lumbis Ogong hanya di dapat dari sekolah yang nilainya terkadang fluktuatif dan harus menyesuaikan dengan anggaran dan pendapatan sekolah. Bagi guru honorer nasib dan jaminan kehidupan

mereka masih jauh dari sejahtera. Terkadang mereka harus berjuang sendiri untuk kesejahteraan mereka. Nasib dan keterjaminan masa depan bagi guru honorer di Kecamatan Lumbis Ogong sangat membutuhkan perhatian dan tindakan yang tegas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Sarana fisik yang merupakan sarana dan prasarana salah satu faktor utama penunjang berjalannya proses pendidikan, selain sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Tanpa ada pendukung sarana dan prasarana yang baik, aktivitas belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan tidak akan berjalan dengan optimal. Sarana dan prasarana di sekolah di wilayah Lumbis Ogong masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini dipaparkan oleh UPT Disdik Kec. Lumbis Bp Achmady, S.Pd. beliau menyampaikan ;

Sarana dan prasarana sekolah di Lumbis Ogong belum maksimal, oleh karena masih banyak fasilitas yang belum memadai seperti; Perlengkapan Buku di perpustakaan, fasilitas lapangan Olah raga, Laboratorim IPA, Ruang kelas yang rusak akibat tidak adanya pemeliharaan, dan asrama guru yang belum tersedia (wawancara, Senin 12 Februari 2018).

Sebagai pilar terdepan negara Indonesia, seharusnya ada pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah perbatasan yang menjadi perhatian pemerintah, agar anak-anak yang berada di sana juga bisa merasakan dan memiliki pendidikan yang layak, bukan hanya terfokus untuk membangun dan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana di daerah-daerah lain atau di daerah perkotaan.

Ketidaklengkapan fasilitas sekolah juga disampaikan oleh Enal dalam blognya <http://kaltara.prokal.co.read/news/2016/08/10/5564-posisi-paling-depan-pendidikan-paling-belakang.html>.

Sesuai dengan paparan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala SD

Negeri 007 Lumbis Ogong yakni Romi mengemukakan bahwa :

Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan bukanlah hal yang baru. Beranda terdepan Indonesia itu seolah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa sekaligus gudang terbelakang dalam pembangunan nasional termasuk bidang pendidikan. Bagaimana tidak, salah satu desa di Kec. Lumbis Ogong yakni desa Tao Lumbis SDN 001 Tao Lumbis, seragam anak-anak sekolah tidak ada. (Diakses tanggal 18 April 2018)

Lebih lanjut Romi menambahkan :

Kondisi tertinggal dunia pendidikan turut juga dirasakan di desa Binter, SDN 007 Binter. Dimana masih terdapat kekurangan, baik dari segi fasilitas sarana dan prasarana belajar mengajar, terutama ruang kelas. (Diakses tanggal 18 April 2018)

Ketidakeengkapan sarana dan prasarana pendidikan juga disampaikan oleh Kepala SDN 006 Tukulon Bpk. Samsi. Beliau menyampaikan bahwa :

Di sekolah kami masih banyak hal yang diperhatikan lagi oleh pihak pemerintah, dari segi sarana dan prasarana. Bagaimana proses pembelajaran mau berjalan dengan baik, jika buku-buku paket pembelajaran tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Buku yang dipakai bukan hanya untuk guru saja, tapi anak-anak didik kami juga sangat membutuhkan. Akhirnya anak-anak kami mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Bagaimana juga mereka mau mendapatkan buku paket atau untuk mengerjakan tugas ?? untuk memfoto kopi buku saja harus menempuh perjalanan herkilo-kilo meter untuk dapat sampai ke Kecamatan Lumbis. Karena hanya kecamatan Lumbis tempat terdekat yang ada tempat untuk foto kopi. (Wawancara: Rabu, 7 Februari 2018).

Beliau juga menambahkan :

Laboratorium sekolah tidak ada, ada beberapa kursi dan meja di kelas yang rusak, ruangan kelas juga ada yang rusak. Selain itu rumah dinas untuk guru juga tidak ada. Hal ini membuat guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi sekolah mendapat kesulitan untuk pergi ke sekolah. Apalagi yang tidak mempunyai kendaraan bermotor. Mereka harus mencari tumpangan untuk dapat ke sekolah. Jika sudah begitu, pembelajaran dari guru bersangkutan harus ditanggulangi oleh guru mata pelajaran yang lain, jika tidak sempat hadir di sekolah. (Wawancara: Rabu, 7 Februari 2018).

Hal ini juga dibenarkan oleh Camat Lumhis Ogong Bp Dauth S.Pd. beliau menyampaikan bahwa ;

Penyebabnya mengapa minat untuk guru mengajar di daerah Kecamatan Lumhis Ogong minim, oleh karena fasilitas yang belum terpenuhi dari segi transportasi yang mahal karena jalur yang dilalui melalui sungai, selain itu juga prasarana asrama guru yang belum maksimal. (wawancara, Senin, 5 Februari 2018).

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh para informan, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Lumhis Ogong yang meliputi: Sumber Daya Dana, belum tercukupi sepenuhnya karena dana bantuan yang di dapat dari pemerintah berupa dana BOS belumlah cukup memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan yang ada. Karena selain pemberian bantuan kepada siswa dan pembayaran gaji tenaga honorer, bantuan yang didapat juga harus namun pada kenyataannya bantuan yang diberikan tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum diperbaiki atau yang belum lengkap. Untuk Sumber Daya Manusia, yang menjadi kendala adalah dalam merekrut tenaga pengajar. Kondisi geografis Lumhis Ogong membuat tenaga pengajar yang bertugas di sana merasa kesulitan untuk menempuh perjalanan menuju ke sekolah. Ditambah lagi dengan biaya transportasi yang bagi guru honorer sangatlah mahal. Selain itu penempatan Guru ASN yang belum merata di daerah Lumhis Ogong. Fasilitas Sarana dan Prasarana pendidikan di setiap sekolah belum terpenuhi sepenuhnya seperti kerusakan gedung atau ruangan, belum tersedianya buku-buku penunjang, belum tersedianya laboratorium IPA dan Bahasa serta fasilitas olahraga. Walaupun sudah ada Sekolah-sekolah di wilayah perbatasan Lumhis Ogong tetapi jika tidak

didukung dengan kebutuhan Sumber Daya Dana, Sumber Daya Manusia dan juga sarana dan prasarana, proses pembelajaran atau administrasi kelembagaan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Menurut *Van Meter dan Van Horn*, apa yang menjadi ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan. Teori yang senada juga disampaikan oleh George C. Edward III. George mengemukakan bahwa “Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Informasi yang diketahui para pengambil keputusan/ Kebijakan hanya didapat melalui komunikasi yang baik”. (Kertya Witaradya, 2010, Tinjauan Teoritis Implementasi Kebijakan Model George C. Edward, <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii.html>, diakses tanggal 10 Mei 2018). Dalam wawancara Peneliti bersama Kepala SMP 1 Lumbis Ogong Bpk Devianos Sambo. S.Pd, beliau menyampaikan bahwa :

Kebutuhan yang sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan kami, sudah disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam wilayah kerja kami. Kebutuhan ini menyangkut penunjang kelengkapan sarana dan prasarana sekolah dan tunjangan untuk tenaga kerja. Hal ini kami sampaikan kepada Bpk Daudt, S.Pd selaku camat Lumbis Ogong dan juga Bpk. Achmady, S.Pd selaku UPT Disdik Kec. Lumbis. Dan tanggapan mereka sangat mendukung, besar harapan kami semoga hal ini dapat terealisasi dengan baik.(wawancara, Senin, 5 Februari 2018).

Kebutuhan akan sarana dan prasarana juga disampaikan oleh Kepala SDN 006 Ubol, Bpk Chandri, S.Pd. dalam wawancara bersama Peneliti, beliau menyampaikan bahwa :

Dalam pertemuan bersama dengan Pengawas UPT, Bpk. Djomon Bapila, S.Pd .SD, kami menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi kendala selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Diantaranya menyangkut sarana dan prasarana sekolah. Saranasekolah ada yang mengalami kerusakan. Seperti di kelas 2, 4 dan 5, meja dan kursi ada beberapa yang mengalami kerusakan. Selain itu yang menjadi kendala juga bagi kami yaitu; kebutuhan akan buku-buku paket. (wawancara, Jumat, 17 April 2018).

Hal Senada juga disampaikan oleh seorang guru SDN 006 Ubol, Bpk. Darnes, S.Pd yang sudah bertahun-tahun mengabdikan di Lumbis Ogong bahwa:

Kami para guru merasa kesulitan dalam menjelaskan materi kepada guru. Apalagi kalau dalam pemberian tugas. Untuk mencari tugas yang diberikan. Satu buku bisa dipakai 5 sampai 7 orang. Minimal satu buku itu dipakai oleh dua oranglah. Agar dalam pencarian tugas lebih maksimal lagi. Jadi kami sangat berharap dari pimpinan yang ada di wilayah lumbis ogong, agar dapat memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh sekolah kami. (wawancara, Jumat, 17 April 2018).

Berdasarkan pemaparan informan-informan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa, dalam menerapkan implementasi kebijakan, perlu adanya di bangun sebuah komunikasi yang dijadikan sebagai jembatan untuk menyalurkan aspirasi atau harapan yang belum terlaksana terlebih khusus dalam bidang pendidikan di daerah perbatasan Lumbis Ogong. Dengan berkomunikasi implementor dalam hal ini, tenaga pendidik yang ada di Lumbis Ogong dapat menyampaikan isi pikiran dan bertukar pikiran dengan pelaksana implementasi kebijakan pendidikan dalam hal ini, Camat Lumbis Ogong, Kepala UPT Disdik dan Pengawas Kecamatan

Lumbis. Dengan komunikasi juga, diharapkan para pelaksana kebijakan dapat segera tanggap, menyikapi setiap persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan di daerah perbatasan, memberikan solusi yang tepat dan dapat teralisasi setiap permintaan yang disampaikan oleh para implementor.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implentasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.” (Witaradya, Kertya. 2010. <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implentasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii.html>. diakses 5 Mei 2018)

5. Karateristik Agen Pelaksana atau Instansi Pelaksana

Dilihat dari pandangan model implementasi *Van Meter dan Van Horn*, maka kerjasama dan dukungan dari pelaksana implentasi kebijakan pendidikan merupakan hal yang bersifat khusus dari variabel karateristik instansi pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn, implentasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga. Hal ini akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat bawahan) bertindak dengan cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan Lumbis Ogong dimonitoring oleh UPT DISDIK Kec. Lumbis dengan pelaksana implentasi oleh tenaga pendidik dan komite sekolah serta didukung oleh camat,

masyarakat dalam hal ini orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini memungkinkan apa yang menjadi kebijakan implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan optimal.

Yang termasuk dalam bagaian intansi pelaksana kebijakan pendidikan di Lumbis Ogong adalah camat Lumbis Ogong Bpk Daudt, S.P dan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Lumbis Ogong, Bpk Budi Kaluan. Komite SMPN 1 Lumbis Ogong juga mempunyai tanggung dan berperan jawab sebagai pelaksana kebijakan pendidikan dalam dimana beliau memberi arahan dalam menyikapi anak-anak yang putus sekolah. Bpk Budi Kaluan telah mengabdikan sejak berdirinya SMP Negeri 1 Lumbis Ogong pada tahun 2006 hingga saat ini.. Beliau mengemukakan:

Setiap kali pertemuan dengan orang tua murid dalam acara pembagian hasil evaluasi belajar (Bagi Rapor), kami menghimbau untuk senantiasa melakukan kewajiban sebagai seorang siswa yaitu menuntut ilmu serta disiplin dalam belajar agar dapat menjadi generasi yang mandiri, kreatif dan inovatif. Selain itu, Komite Sekolah juga menghimbau kepada orang tua siswa untuk tidak membawa anak bekerja di hutan selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung, misalnya; mencari kayu gaharu berminggu-minggu lamanya, karena hal tersebut akan berdampak pada proses pembelajaran anak, dimana anak tersebut akan mengalami keterlambatan materi pembelajaran serta tidak berkonsentrasi dalam belajar. (wawancara, Minggu tanggal, 04 Februari 2018).

Beliau juga menambahkan :

Setiap pertemuan sekolah kami mengajak dan menghimbau agar anak-anak sekolah jangan sampai putus sekolah ditengah jalan dan harus melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Agar kelak dapat menjadi generasi yang dibanggakan di tanah kelahirannya. (wawancara, Minggu tanggal, 04 Februari 2018).

Dalam wawancara Penulis bersama Camat Lumbis Ogong, Bpk Daudt S.Pd, beliau mengemukakan:

Untuk mengatasi permasalahan prasarana sekolah yang belum terpenuhi seperti Gedung sekolah, pengadaan buku perpustakaan, dan fasilitas olahraga di halaman sekolah, kami merasa perlu untuk membenahi hal-hal tersebut. Kami dari pemerintah kecamatan telah memberikan usulan kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten untuk dapat menyikapi apa yang menjadi kebutuhan pendidikan di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong. Usulan yang kami sampaikan dalam bentuk proposal. Besar harapan kami semoga hal ini secepatnya dapat kabulkan dan terealisasi secepatnya. (wawancara; Senin 05 Februari2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa pelaksana instansi implentasi kebijakan pendidikan sudah berjalan dengan baik. Penulis juga berharap semoga apa yang menjadi harapan instansi pelaksana kebijakan dapat terealisasi dengan baik.

6. Lingkungan Sosial, Budaya dan Ekonomi

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa sukses tidaknya implentasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal.
- 2) Ketersediaan waktu dan sumber dana yang cukup
- 3) Dukungan yang berbagai sumber daya yang ada
- 4) Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kualitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan.
- 5) Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Kehidupan masyarakat Lumbis Ogong yang masih kental dengan adat istiadatnya, sangat menjunjung tinggi dan menghargai tradisi leluhur nenek moyangnya. Tradisi yang dijaga turun-temurun dapat mempengaruhi

implementasi kebijakan pendidikan yang diterapkan. Dimana mereka lebih memilih patuh terhadap tradisi yang ada ketimbang memilih pembaharuan yang ada. Anak-anak yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, sudah dinikahkan di usia yang masih tergolong dini atau remaja. Selain dinikahkan, anak-anak terkhusus anak laki-laki sudah diharuskan untuk membantu orang tua untuk menambah keuangan keluarga.

Dalam wawancara bersama Kepala SMPN 2 Lumbis Ogong Desa Tao Lumbis, Bpk. Ruddy, SE. Beliau menyampaikan bahwa:

Di sekolah kami, dalam tahun ajaran ini, ada 5 orang yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena ada sudah yang menikah dan ada yang membantu orang tuanya mencari kayu gaharu di hutan. Dan perjalanannya membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. (wawancara: Senin, 19 Februari 2018).

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala SMPN 3 Lumbis Ogong Desa

Sedalip. Bpk. Agustinus K menyampaikan bahwa

Pernikahan dini di bagian daerah Lumbis Ogong sepertinya sudah menjadi rutinitas yang terjadi setiap tahunnya. Pernikahan yang melibatkan siswa atau anak perempuan menjadi salah penyebab berkurangnya jumlah siswa serta menurunnya kualitas pendidikan anak-anak di desa Sedalip. (wawancara: tanggal 30 April 2018)

Beliau menambahkan :

Sebenarnya orang tua punya peranan penting dalam hal ini, dimana mendukung anak-anaknya untuk bersekolah, bukannya mendukung mereka untuk menikah di usia yang masih tergolong muda. Yang menjadi faktor pendukung anak-anak sudah menikah di usia yang muda karena keterikatan dengan adat yang diturunkan secara turun temurun. (wawancara: tanggal 30 April 2018).

Informasi dari dua informan diatas, diperkuat oleh argumen yang disampaikan oleh Terry Sompotan dalam Penelitiannya yang berjudul "*Dampak Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Dayak Agabag Kabupaten Nunukan.*

Teri Sompotan Memaparkan :

“Masih terjadi anggota masyarakat Dayak Agabag (masih usia sekolah) di desa Binter di Kec. Lumbis Ogong Kab. Nunukan melaksanakan perkawinan di usia muda. Dorongan kawin muda di daerah desa Binter dikarenakan rendahnya pendidikan finansial/ekonomi yang rendah, tradisi budaya masyarakat Agabag disertai faktor lingkungan masyarakat (khususnya orang tua) dan adanya perasaan malu bagi orang tua bila anak gadisnya tidak segera mendapatkan jodoh”. <http://terisompoton.ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/2017/28/08/dampak-perkawinan-usia-muda-pada-masyarakat-dayak-agabag.html> ,(diakses tanggal 10 Mei 2018)

Berdasarkan pemaparan diatas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan yang masih mengikat serta pemahaman yang masih kurang, membuat sebagian dari orang tua atau masyarakat menganggap bahwa pendidikan bukan suatu kebutuhan yang utama. Usia bukanlah menjadi faktor penentu untuk menikahkan anak mereka. Hal yang diperhatikan jika anak sudah mampu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan mencapai kondisi fisik tertentu, maka anak tersebut sudah bisa dinikahkan. Faktor sosialpun menjadi alasan bagi para orangtua untuk segera menikahkan anak gadisnya, dengan alasan bahwa mereka akan merasa malu jika anaknya belum juga mendapat jodoh atau menikah. Menikah di usia muda akan mengangkat derajat kehormatan orang tua dari anak tersebut atau dengan kata lain orang tua akan menjadi bangga jika mampu menikahkan anaknya di usia muda. Peneliti juga menemukan, bukan hanya kemauan atau dukungan orang tua, pernikahan dini terjadi karena anak merasa sudah cukup umurnya dan merasa bangga juga jika dapat menikah duluan dari teman-temannya. Selaian itu, pernikahan dini terjadi, karena anak tersebut sudah tidak sanggup untuk bersekolah kemudian mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan, sehingga menikah yang muda yang menjadi pilihannya.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu anak menikah diusia muda.

Terry Sompotan dalam Penelitiannya yang berjudul "*Dampak Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Dayak Agabag Kabupaten Nunukan*". Mengemukakan:

"Salah satu terjadinya faktor perkawinan usia dini di desa Binter, yaitu karena tingkat ekonominya lemah. Anak (terutama perempuan) ingin cepat kawin agar dapat segera keluar dari kesulitan hidup, denganharapan suaminya dapat menanggung keluarga pihak istri. Keadaan ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun usia si anak masih tergolong muda atau belum mencukupi untuk memasuki usia perkawinan.<http://terisompoton.ejournal.sos.fisip.unmul.ac.id/site/2017/28/08/dampak-perkawinan-usia-muda-pada-masyarakat-dayak-agabag.html> ,(diakses tanggal 10 Mei 2018).

Pernikahan dini yang terjadi di daerah Lumhis Ogong, seyogyanya menjadi perhatian bersama dari seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menyikapi hal tersebut. Menikahkan anak di usia dini bukanlah satu-satunya jalan untuk mendapat kepuasan kebutuhan jasmani. Dengan menikahkan anak di usia dini, secara sengaja telah merampas apa yang menjadi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan Perempuan dan Anak. Bab III, Pasal 13 huruf c" Setiap Anak Berhak Mendapat Pendidikan". Dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan Perempuan dan Anak. Bab III, Bagian Kesatu Paragraf 1, Pasal 4 huruf d "Mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sudah seharusnya kita mendukung pendidikan anak-anak, mulai dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Pendidikan yang layak bagi anak-anak, akan membantu mereka

menjadi generasi yang bertanggung jawab dan mandiri terhadap diri pribadi dan juga orang lain.

Komunikasi juga perlu dijalin, pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak serta menolak yang namanya “Pernikahan Dini”.

Dalam melaksanakan kebijakannya pelaksana kebijakan implementasi pendidikan dalam hal ini Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Lumbis Ogong Bapak Budi Kaluan berkordinasi dengan tokoh adat masyarakat setempat. Beliau mengatakan:

Kami pihak Komite Sekolah dan Tokoh adat sudah menghimbau untuk tidak menikahkan anak usia dini, karena sekolah itu harus diutamakan. Jika anak-anak kita sudah mendapatkan pendidikan yang layak, kelak mereka akan menjadi generasi penerus yang mempunyai kualitas yang baik. Nantinya mereka dapat dipercayakan untuk dapat menjadi pemimpin di daerah kita ini. Karena dalam sebuah sistem organisasi, diperlukan yang namanya pengkaderan. Selanjutnya, kita yang tua-tua ini akan terus menjadi pemimpin, karena kelak nantinya juga akan diganti oleh tidak anak cucu kita. (wawancara, Minggu 4 Februari 2018).

Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik, jika sebagai pelaksana implementasi kebijakan dengan sungguh-sungguh mau untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, ada kesadaran dari orang tua dan masyarakat untuk mau menerima perubahan yang ada, demi terciptanya suatu pendidikan yang berkualitas.

7. Disposisi (Kecenderungan) Pelaksana

Dari sudut pandang model implementasi Van Meter dan Van Horn, Kecenderungan atau Disposisi Pelaksana termasuk salah satu variabel bagi pelaksana implementasi kebijakan pendidikan. Van Meter dan Van Horn

memandang terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan yakni:

- 1) Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman terhadap kebijakan;
- 2) Arah respon mereka, apakah menerima, netral atau menolak;
- 3) Intensitas tanggapan mereka terhadap kebijakan.

Teori variabel disposisi pelaksana menurut Van Mater dan Van Horn, juga didukung oleh teori variabel disposisi pelaksana menurut George C. Edwards III (*Witaradya, Kertya, 2010. <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii.html>. diakses 10 Mei 2018*). Edwards mengungkapkan bahwa :

Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Komite sekolah sebagai bentuk wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di lingkungan sekolah, terutama dalam pembuatan kebijakan dan program sekolah, terutama kebijakan terkait dengan komponen input dalam persekolahan, seperti penyusunan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia (guru dan karyawan), program yang terkait dengan kesiswaan, pengembangan sarana dan prasarana. Dalam wawancara Peneliti bersama Komite SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Budi Kaluan, terkait dengan pengembangan kompetensi guru, beliau memaparkan :

Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada rekan-reka guru SMPN 1 Lumbis Ogong, dimana kualitas pendidikan bukan hanya tergantung sepenuhnya dari kelengkapan sarana dan prasarana saja, tetapi bagaimana kemampuan guru itu bisa ditunjukkan. Menjadi tenaga pengajar yang berkualitas itu sangat diharapkan. Menjadi seorang guru itu harus punya standar kualitas pribadi.(wawancara :Senin, 30 April 2018)

Lebih lanjut beliau menyampaikan :

Hal-hal yang harus diperhatikan. Diantaranya ; sebelum mengajar dia harus bisa merencanakan tujuan pembelajaran, menyiapkan pembelajaran yang kreatif, setelah itu memberi motivasi dan mendorong siswa dalam pembelajaran. Terakhir dia harus mengevaluasi semua yang sudah direncanakan dan dijalankan, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum.(wawancara :Senin, 30 April 2018).

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab guru serta diwajibkan agar bisa menjadi guru yang profesional dan berkualitas, Kepala SMPN 1 Lumbis Ogong, Bapak Devianus Sambo, S.Pd dalam wawancara menyampaikan:

Bukannya guru-guru yang ada di SMPN 1 Lumbis Ogong ini tidak mau untuk menjalankan tugasnya. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada bapak dalam wawancara sebelumnya. Kami ini terkendala dengan buku-buku paket. Belum lagi Kurikulum 2013 yang harus dijalankan. Jangankan Kurikulum 2013, Kurikulum 2006 saja dulu, buku-bukunya saja tidak lengkap. Jujur saja, kami ini merasa terkendala dengan pelaksanaan K-13, jadi ya kami pakai buku-buku untuk kurikulum 2006 dalam proses pembelajaran ,walaupun memang terbatas sekali jumlahnya.(wawancara :Senin, 23 April 2018)

Ditambahkan oleh salah seorang guru SMPN 1 Lumbis Ogong, Ibu.

Marwali, S.Pd :

Kami diwajibkan untuk melaksanakan Kurikulum 2013, itu memang harus. Tetapi yang menjadi persoalannya, kami ini belum diberi kesempatan untuk diperkenalkan dan dibekali dengan yang namanya K-13. Bagaimana mau jalankan, kalau kami ini masih buta dengan yang namanya K-13 itu. (wawancara :Senin, 23 April 2018)

Lebih lanjut beliau menyampaikan :

Sepertinyakami ini, bukan hanya di sekolah kami, tapi juga disekolah-sekolah lain yang ada di Kecamatan Lumbis Ogong, dipandang sebelah mata. Mungkin karna letak kami yang sulit dijangkau. Jadi hanya sekolah di daerah-daerah lain yang memang bisa dengan mudahnya dijangkau yang lebih diperhatikan. Diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Diberi kesempatan untuk bisa menikmati perubahan yang ada. Diberi kesempatan untuk bisa menjadi menjadi guru yang berkompeten. Lalu kita-kita ini ??? merasa seperti terbuang.(wawancara :Senin, 23 April 2018)

Ditambahkan lagi oleh Kepala SMPN 1 Lumbis Ogong, Bapak Devianus

Sambo, S.Pd :

Yang disampaikan oleh Pa Marwali, benar adanya. Kalau memang menginginkan guru yang berkualitas, setidaknya kita ini harus dibekali dengan persiapan yang mantap. Memang sebagai guru kita harus dituntut bisa mengikuti perubahan yang ada dan menyelesaikan persoalan yang terjadi, misalnya cari-cari informasi lewat internet. Tetapi seperti yang bapak tahu sendiri. Jangankan untuk akses internet, untuk mau telfon saja susah untuk dapat jaringanya, bagaimana kita mau internetan. Setidaknya dari pihak pemerintah atau dinas pendidikan lebih peka lagi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah Lumbis Ogong ini. Karena kita juga memperoleh hak yang sama.

Beliau juga menambahkan :

Kami juga sudah menyampaikan harapan kami kepada dinas pendidikan lewat UPT Disdik, agar ruangan-ruangan kelas yang sudah rusak, dapat diperhatikan dan selanjutnya bisa diperbaiki. Kemudian pembayaran gaji-gaji guru honorer. Kasihan juga mereka, bagi yang tinggal jauh dari lokasi sekolah. Biaya pulang pergi tak sebanding dengan gaji yang di dapatkan. Kami sangat mengharapkan tunjangan khusus bagi guru-guru honorer juga agar bisa didapatkan.(wawancara :Senin, 23 April 2018)

Berdasarkan pemaparan-pemaparan informan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam melaksanakan implementasi kebijakan, implementor sudah menjalankan tugasnya, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan ditemui kendala. Menurut Penulis, seharusnya ada pemerataan pendidikan untuk sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali di daerah perbatasan Lumbis Ogong juga. Kesenjangan pendidikan terjadi, memberi

kesan bahwa sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah lain atau di daerah perkotaan, mutu pendidikannya lebih berkualitas baik itu guru maupun siswanya, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di perbatasan wilayah Indonesia terkhusus wilayah perbatasan Lumbis Ogong. Bukan hanya itu, dari segi sarana dan prasarana juga, kelengkapan akan fasilitas sarana dan prasarana untuk sekolah-sekolah perbatasan sangat memprihatinkan. Peneliti menemukan, untuk fasilitas olahraganya, hampir semua lapangan untuk olahraga lantainya berupa tanah liat, sedangkan sekolah ditempat lainnya, lantai lapangan olahraganya sudah hersemen. Berdasarkan SK Bupati Nunukan Nomor 188.95/51/11/2014 Tanggal 3 Februari 2014” Tentang Sekolah-sekolah yang berada di wilayah khusus”, pemerataan pendidikan harus dilakukan agar tidak ada jurang pemisah antara sekolah-sekolah yang berada di perbatasan dengan sekolah-sekolah yang berada di luar Lumbis Ogong. Guru dan siswa harus mendapatkan kesempatan yang sama, untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Menindaklanjuti kerja pemerintahan Jokowi-JK dalam program Nawa Cita, Dinas pendidikan kabupaten harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di dalam dunia pendidikan perbatasan Lumbis Ogong. Dalam program Nawa Cita Jokowi-JK, butir ke-5, dikatakan bahwa; “ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera, dst.

Pendidikan di Lumbis Ogong merupakan tanggung jawab bersama bagi para implementor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perkataan harus disertai dengan perbuatan nyata. Ketika implementor dapat menjalankan tanggung jawabnya dan ketika tanggung jawab itu dapat teralisasi dengan baik, maka

pendidikan di Lumbis Ogong akan terlaksana secara optimal, pemerataan pendidikan akan dirasakan oleh guru dan siswa dan tidak ada kesenjangan pendidikan lagi, tidak terisolir dari dunia luar, secara keseluruhan kita dapat menjalankan program Jokowi-JK, Nawa Cita. Serta menjadikan daerah perbatasan Lumbis Ogong sebagai garda terdepan Indonesia yang melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, berinovati dan berkreatif.

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah Perbatasan di Daerah Kecamatan Lumbis Ogong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti lewat model Implementasi Kebijakan *Van Meter* dan *Van Horn* dengan menggunakan 6 variabel, yaitu Standar dan sasaran kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi Antar Organisasi Terkait; Karakteristik Agen Pelaksana; Lingkungan Sosial dan Ekonomi; serta Disposisi Pelaksana, Peneliti memukan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah Perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemukan yaitu:

Seperti yang sudah disampaikan oleh kepala SDN 006 Tukulon, Bapak Samsi, S.Pd, beliau mengatakan:

Melalui bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah, anak-anak yang mendapat bantuan, dimana rata-rata pekerjaan orang tua adalah buru tani, merasa terbantu dengan adanya bantuan yang diterima.(wawancara : Rabu 7 Februari 201)

Bantuan kepada siswa kurang mampu diberikan melauai dan BOSDA dan BOSNAS. Bantuan. Bantuan kepada siswa SD. Untuk bantuan BOSDA, 1 orang siswa diberi bantuan Rp. 75.000 pertahun. Sedangkan untuk bantuan BOSNAS 1 orang siswa diberi bantua RP.750.000 pertahun.(Wawancara: Rabu 7 Februari 2018)

Implementor telah melaksanakan kebijakan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan adanya kendala, sehingga yang menjadi tujuan atau sasaran dari implementor tidak mendapatkan kebijakan secara menyeluruh. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala SMPN 1 Lumbis Ogong Bpk Devianos Sambo, yaitu :

Masih banyak kebutuhan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah Lumhis Ogong, termasuk juga kami di SMPN 1 Lumbis Ogong. Kebutuhan terkait fasilitas sarana dan prasarana yang belum lengkap. Hal ini membuat kami guru dan siswa terkendala dalam kegiatan proses pembelajaran. Salah satunya adalah ketersediaan buku-buku paket yang sepenuhnya belum dimiliki oleh guru dan siswa. (Wawancara: Senin, 12 Februari 2018)

Kendala yang dihadapi oleh implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan juga di utarakan oleh Bupati Nunukan Asmin Laura (dalam blognya Eddy Santry; <http://www.indeksberita.com/2017/02/09sarana-pendidikan-wilayah-perbatasan-masih-memprihatinkan.html>, (Diakses Tanggal 13 April 2018), beliau menyampaikan keprihatinan sekaligus menegaskan bahwa :

sebenarnya perencanaan untuk pendidikan terutama di wilayah pedalamam sudah terprogram namun pihaknya masih belum dapat berbuat banyak karena minimnya anggaran pendidikan dari pusat untuk daerah Nunukan. Kita akan terus mengupayakan agar generasi muda di Kabupaten Nunukan ini benar-benar dapat menikmati sarana pendidikan yang layak. Apalagi untuk wilayah seperti Lumhis dan Lumbis Ogong, itu masih jauh adri standar untuk saran pendidikannya maupun jumlah personil pengajarnya. (Diakses, Jumat, 4 Mei 2018).

Dalam kesempatan itu, beliau juga berharap agar pemerintah pusat dapat menambah anggaran khususnya dalam bidang pendidikan untuk Kabupaten Nunukan yang notabene sebagai garda terdepan wilayah NKRI. Disamping sebagai aktualisasi pemerataan pendidikan, juga sekaligus sebagai bentuk penguatan program-program Nawacita Jokowi. (Diakses, Jumat, 4 Mei 2018)

Beliau juga menambahkan :

Intinya ini terletak pada anggaran. Kita sudah berusaha memaksimalkan setiap anggaran untuk sektor-sektor tertentu khususnya pendidikan. Kami berharap kedepan pemerintah pusat dapat lebih menitikberatkan konsentrasinya terutama dalam infrastruktur dan pendidikan pada wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Lumbis dan Lumbis Ogong. (Diakses, Jumat, 4 Mei 2018).

Menurut Penulis, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif dan efisien maka sebagai pelaksana implementasi harus menjalankan kebijakan dengan konsisten dan jelas. Pemerintah terutama pemerintah pusat harus benar-benar memperhatikan pendidikan yang ada di daerah perbatasan. Setiap program yang sudah ditetapkan harus diterapkan secara jujur dan adil agar masyarakat di perbatasan Lumbis ogong mendapatkan pendidikan yang layak dan menyeluruh

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Melibat kenyataan yang ada di daerah perbatasan. Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan implementasi kebijakan pendidikan secara seutuhnya, karena ditemukan adanya beberapa kendala yang menyebabkan implementasi kebijakan di daerah perbatasan Lumbis Ogong tidak sesuai dengan diharapkan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan di daerah perbatasan Lumbis Ogong antara lain :

1. Belum ada pemerataan satuan pendidikan yaitu pada tingkat SMA/SMK. Di Lumbis Ogong belum memiliki SMA/SMK. Hal tersebut membuat anak-anak yang berada di daerah Lumbis Ogong harus melanjutkan sekolah di luar daerah Kecamatan Lumbis Ogong. bahkan ada yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena jarak tempuh yang jauh, kondisi geografis dimana transportasi yang hanya dapat dilewati melalui jalur sungai, serta biaya ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
2. Belum ada pemerataan guru disetiap lembaga pendidikan, terkhusus untuk guru ASN, karena yang lebih banyak adalah tenaga guru honorer. Hal ini sangat mempengaruhi karena kualitas suatu pendidikan juga ditentukan oleh sumber daya yang berkualitas, artinya sudah memiliki cukup banyak pengalaman di bidang pendidikan dimana pengalaman yang dimiliki dapat diimplementasikan untuk dapat mencapai suatu mutu pendidikan yang berkualitas.
3. Dalam rekrutmen tenaga guru di daerah Lumbis Ogong, terdapat tenaga guru yang memilih untuk mutasi ke daerah lain diluar Kecamatan Lumbis Ogong yang daerahnya lebih strategis untuk ditujui.
4. Kelengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai. Dimana terdapat ruang-ruang kelas yang sudah rusak; serta belum tersedianya kelengkapan prasarana seperti buku-buku penunjang dalam proses pembelajaran, fasilitas lapangan olahraga, serta Laboratorium IPA. Hal ini juga menjadi penghambat kelancaran proses pembelajaran bagi guru maupun siswa. Ada sebgaiian anak-anak yang memilih bersekolah di negara tetangga yaitu Malaysia karena jarak yang dekat untuk di tempuh. Selain itu juga biaya sekolah yang gratis serta mutu pendidikannya terjamin.
5. Kehidupan masyarakat Lumbis Ogong yang masih kental dengan adat istiadatnya, membuat anak-anak yang masih usia dini sudah harus menikah.
6. Kurang adanya dukungan dan pemahaman dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena masih terdapat orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk bekerja di waktu jam sekolah. Bahkan ada yang bekerja sampai berhari-hari. (Sumber: Kepala UPT Disdik Lumbis)

Menurut Penulis, sebagai pilar terdepan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, seharusnya daerah perbatasan memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya dalam dunia pendidikan. Kondisi pendidikan yang buruk menjadikan daerah perbatasan sebagai tempat yang paling tertinggal dan terbelakang dalam kemajuan pendidikan, padahal daerah perbatasan Lumbis Ogong merupakan salah satu baris terdepan negara Indonesia. Ketika pelaksana kebijakan pendidikan tidak

menjalankan kewajibannya dan tidak merespon dengan baik apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat di daerah perbatasan, maka tidak heran jika mereka mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak pemerintah.

Disampaikan oleh Kepala UPT DISDIK Kec. Lumbis, Bapak Achmady, S.Pd.SD dalam wawancaranya, beliau menyampaikan bahwa :

Anak-anak kita ini yang ada di daerah Lumbis Ogong, yang mau dan sudah bersekolah, boleh-holeh dimana saja mereka memilihnya, sebatas itu masih dikawasan Lumbis Ogong, atau di kecamatan tetangga misalnya di Lumbis atau di daerah kabupaten. Tidak mejadi persoalan selama itu dalam pengawasan kita. Tapi yang jadi masalahnya ini, ada di antara anak-anak kita yang menempuh pendidikan di luar kawasan Indonesia, yaitu Malaysia. Yang menjadi pemicunya antara lain: fasilitas pendidikan yang disediakan oleh negara tetangga jauh berbeda sekali dengan fasilitas yang ada di daerah perbatasan; biaya sekolah gratis; tenaga pendidiknya lebih oke karena berkualitas dan profesional dalam pekerjaannya; selain itu menurut mereka akses untuk menuju kesana lebih cepat dan aman dibandingkan dengan lokasi daerah perbatasan yang mana jauh untuk menempuh perjalanan, melewati jurang dan hutan , belum lagi ditambah dengan kehadiran binatang buas yang sewaktu-waktu menghadang perjalanan dan membahayakan diri mereka. Ya, otomatis mereka memilih yang baik menurut pemabaman mereka.

Ditambahkan lagi oleh beliau:

Kalau mau di bilang, hal ini merupakan suatu bentuk protes atau teguran kepada pihak pemerintah Indonesia karena merasa tidak dipedulikan. Kalau dari negara tetangga bisa menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, mengapa kita tidak bisa?? La, kita ini kan anak kandungnya bangsa Indoesesia. Seharusnya mata hati kita terbuka melihat situasi yang ada sekarang ini. Sampai kapan kita harus tinggal diam. Apakah harus menunggu dulu semuanya diambil alih oleh pihak lain, baru kita bergerak?? Saya kira sangat terlambat sudah. Bersama-sama dengan pihak sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat, kami menghimbau dan memberi pemahaman kepada siswa, orang tua dan masyarakat agar lebih memilih pendidikan di kawasan kita sendiri. Kita kan tidak tahu, mungkin di balik kenyamanan yang disediakan ada maksud yang tersembunyi yang nantinya bisa merugikan diri kita sendiri. Walaupun pendidikan kita masih jauh dengan pendidikan dengan daerah-daerah lain, tetapi kita harus bersyukur diberi kesempatan untuk dapat bersekolah atau menyekolahkan anak-anak kita. Perjuangan kita tidak akan berakhir begitu saja. Dibutuhkan proses yang begitu panjang sampai kita bisa menikmati apa yang harus menjadi baknya kita. Sakit memang, tetapi ketika kita bisa

bergandengan tangan, mencari solusi yang tepat dan tetap terus dan terus mau untuk bekerja untuk melalui semuanya. Ketika kita bisa melaluinya maka hasil akhir tidak akan pernah mengecewakan setiap proses yang sudah terjadi.

Faktor penghambat implementasi kebijakan juga ditemui oleh Anggota Komisi VII DPR RI, dr Ari Yusnita bersama rombongan ketika mengadakan kunjungan kerja ke daerah ke Kecamatan Lumbis Ogong (Dalam blognya Arifuddin; <https://karyawannunukan.wordpress.com/2016/08/08/catatan-anggota-dpr-ri-ari-yusnita-kunjungan-dob-kabudaya.html>, 18 April 2018). dalam kunjungan kerjanya ada beberapa kendala yang ditemui oleh dr Yusnita bersama rombongan, diantaranya :

1. Di desa Binter, sektor pendidikan menjadi perhatian sebab belum ada listrik sehingga masih menggunakan genset. Buku-buku yang ada di sekolah juga masih sangat sedikit dan tidak ada perpustakaan
2. Sekolah di desa Sumantipal sungguh mengejutkan para rombongan, dimana sarana dan infrastruktur yang ada di sekolah, sudah tidak layak dipakai atau digunakan oleh anak-anak sekolah. Gedung sekolah yang atapnya sudah mulai roboh, dan proses pembelajaran berjalan sulit ketika mengalami banjir. Prasarana seperti meja belajar dan kursi-kursi juga sudah sangat buruk. Selain itu, perpustakaan yang tidak dimiliki oleh sekolah sehingga anak-anak sekolah tidak memiliki buku pelajaran kecuali dari apa yang diajarkan oleh para guru. Bahkan terdapat dua kelas yang bergabung seperti, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas .

Dasar hukum yang menjamin pemenuhan dan kesetaraan pendidikan di Indonesia yaitu :

1. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal-pasal yang berhubungan dengan pendidikan dalam UUD 1945 adalah pasal 31 dan pasal 32. Yang berbunyi: Pasal 31 ayat 1 berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 berbunyi : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 berbunyi: mengharuskan pemerintah mengadakan satu sistem pendidikan nasional untuk memberi kesempatan kepada setiap warga negara menciptakan pendidikan. Pasal 32 ayat 1 berbunyi : memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Ayat 2 berbunyi: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional.
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Pasal 42 ayat 1 berbunyi: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber-sumber lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat 2 berbunyi : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,

instalansi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/temat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pasal 43 ayat 1 berbunyi: Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Ayat 2 berbunyi: standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. Ayat 3 berbunyi: Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. Ayat 4 berbunyi: Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. Pasal 44 ayat 1 berbunyi: Lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 (ayat 2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana, penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Ayat 4 berbunyi: standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut. Ayat 5 berbunyi: standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Dalam GBHN Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999), dijelaskan :

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.

Dilihat dari landasan hukum negara yang menjamin akan pendidikan di Indonesia secara menyeluruh, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa sudah jelas aturan yang dibuat oleh hukum di Indonesia. Daerah perbatasan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena itu merupakan hak mutlak bagi segenap rakyat Indonesia. Pendidikan yang merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa penghambat pelaksanaan kebijakan implementasi karena adanya ketidaksamaan pendapat, mementingkan kepentingan atau keinginan sendiri dan saling tidak menghargai pendapat.

Hal ini diperkuat dengan penyampaian oleh Kepala UPT DISDIK Kec. Lumbis bahwa

Informasi yang kami terima, sebenarnya sudah ada itu dana yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk pembangunan seluruh kawasan Indonesia termasuk kawasan perbatasan pada tahun 2016. Dananya berkisar 100 milyar lebih dan diperuntukkan untuk pembangunan daerah perbatasan termasuk pembangunan pendidikan. Tapi dana tersebut tidak teralokasi dengan baik, buktinya pendidikan di perbatasan ini, tidak tersentuh dengan baik oleh pemerintah.

Menurut Penulis, dalam memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Mengelola SDM yang ada melalui pendidikan jangan hanya sebatas wacana atau kata-kata saja, tetapi harus disertai dengan perbuatan yang nyata karena pendidikan merupakan hak yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Jelas dalam UUD 1945 tersirat bahwa “tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk terutama yang berada di daerah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan berhak untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi juga peran serta dari masyarakat setempat Lumbis Ogong serta orang tua karena pendidikan di Kecamatan Lumbis Ogong mengalami masalah yang sangat kompleks. Amanah yang tertuang dalam peraturan-peraturan atau payung hukum seperti peraturan daerah atau pemendiknas yang menaungi kebijakan pendidikan kesetaraan sebagai rujukan nasional belum berjalan dengan optimal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan yang diuraikan pada Bab IV dalam penelitian ini, maka secara keseluruhan dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan di daerah Perbatasan Lumbis Ogong

Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong, sudah mengacu kepada kebijakan pendidikan Nasional namun dilihat dalam implementasinya belum terlaksana dengan optimal hal ini disebabkan oleh berbagai faktor dalam implementasinya.

2. Faktor penghambat.

Dalam Implementasi kebijakan berkaitan dengan enam faktor dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di kecamatan Lumbis Ogong khususnya dalam hal:

- a. Tenaga guru yang masih minim, dan pemerataan tenaga guru belum maksimal.
- b. Ketidaktersediaan fasilitas penunjang, seperti Listrik, jaringan internet, buku pembelajaran, prasarana perumahan guru, laboratorium, alat peraga.
- c. Alat Tranfortasi hanya melalui jalur sungai sehingga biaya oprasinal mahal.

- d. Peran serta tokoh masyarakat untuk bisa bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menuntaskan wajib belajar dua belas Tahun, agar mengurangi tingkat pernikahan dibawah usia dini.

B. Saran

1. Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menganalisis kebijakan pendidikan di Daerah Perbatasan .

2. Saran Praktis

- a. Disarankan kepada pihak pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan agar lebih serius lagi untuk menanggapi dalam menyelesaikan permasalahan kebutuhan pendidikan di daerah perbatasan Lumbis Ogong. Dengan mengusulkan penambahan tenaga guru yang siap tuk mengajar didaerah kecamatan lumbis ogong , juga mengusulkan ketersediaan sarana dan prsarana sekolah; seperti gedung atau ruangan kelas yang harus diperbaiki karena mengalami kerusakan, penempatan guru-guru ASN, membangun ruangan laboratorium IPA dan bahasa bagi sekolah-sekolah yang belum memilikinya, ketersediaan fasilitas olahraga, ketersediaan buku-buku pelajaran bagi guru dan juga siswa. Maka segala kebutuhan sekolah yang ada akan terpenuhi secara merata, sehingga pendidikan di daerah perbatasan Lumbis Ogong dapat berjalan dengan baik dan optimal.
- b. Disarankan kepada pihak sekolah, dimana guru memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Demi

terselenggaranya pendidikan yang baik, guru dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, serta dapat merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih siswa, melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Disarankan kepada pihak masyarakat, tokoh-tokoh adat dan orang tua agar dapat menyadari dan mau untuk menerima perubahan, bahwa pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan anak-anak. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan yang baik dan mengikuti perubahan jaman yang semakin modern agar tidak tertinggal kemajuannya dengan sekolah-sekolah yang ada di luar Lumbis Ogong, maka anak-anak harus dimotivasi dan diberi kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas : Jakarta
- Arikunto, Suharsimi 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara : Jakarta
- Baedowi, Tanpa Tahun. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan : Studi Kasus kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*
- Darmadi, Hamid. 2007. *Dasar konsep Pendidikan moral*. Bandung: Alfabeta.
- Deddy Mulyadi. 2015. *Studi kebijakan public dan pelayanan public*. Bandung: Alfabeta.
- Dewantoro, Ki hajar. 1962. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Jogjakarta: Taman Siswa.
- Fuad, Ihsan. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara, GBHN*. 1989
- Indra Djati Sidi. 2003. *Menuju Masyarakat Belajar*. Jakarta: Logos.
- Johnston, W.B&Packer ,A.E.1987. *Workforce 2000 : Work and Workers for the twenty-First Century*. Diane Publisng : Hudson Institute, Indianapolis,\Indiana
- K. Yin, Robert , 2009. *Studi kasus desain dan metode*. Penerjemah Mudzakir. PT.Radja Grafindo Perkasa : Jakarta
- Maleong, Levy J, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya Bandung
- Mudyaharjo, Redja. 2001. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhadjir, Noeng, 2003. *Metodologi penelitian dan evaluation research, Integrasi penelitian kebijakan dan perencanaan*. PT. Rake sarasin : Jogjakarta
- Soctriono dan Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta :Bandung
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung

- Sugiyono, 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Alfabeta :Bandung
- Sukmadiatata, N.S. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Yayasan Kusuma Karya.
- Afandi. 2013. *Pendidikan di Daerah Perbatasan : Terdepan Sekaligus Terbelakang*. Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kloang klede Putra Timur.
- Hamid Darmadi, 2013. Sudarwan Danim. 2007. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.



DOKUMEN

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3, Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3, Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan Perempuan dan Anak. Bab III, Bagian Kesatu Paragraf 1, Pasal 4 huruf d “Mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan Perempuan dan Anak. Bab III, Pasal 13 huruf c” Setiap Anak Berhak Mendapat Pendidikan”.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak. Bab III, Paragraf 4 Tentang Pendidikan Pasal 18 ayat 1” Penyelenggara Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak”.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak. Bab III, Paragraf 4 Tentang Pendidikan Pasal 18 ayat 2” Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi”.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak. Bab III, Paragraf 4 Tentang Pendidikan

Pasal 23 “Bagi anak yang tidak menempuh pendidikan formal, dapat menempuh pendidikan, melalui satuan pendidikan nonformal”.

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dengan tujuan memberikan pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Surat Keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor: 188.45/51/II/2014 tentang Satuan Pendidikan yang Berlokasi di Daerah Wilayah Khusus

Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0050.3405/C5/TK/T1?2017 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS Daerah Pada Jenjang Pendidikan dasar

Data Penduduk kecamatan Lumbis Ogong kabupaten Nunukan Tahun 2016

Foto bersama nara sumber di kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan

UMBER INTERNET

<https://ainimulyana.blogspot.com/2015/03/sarana-dan-prasarana-sekolah.html>, (Diakses tanggal 12 Mei 2018)

<http://enalkaltara.prokal.co.read/news/2016/08/10/5564-posisi-paling-depan-pendidikan-paling-belakang.html> (Diakses Tanggal 18 April 2018)

<http://heru2273.blogspot.com/2014/12/model-implementasi-ripley-danfranklin.html> () (Diakses Tanggal 13 April 2018)

<https://karyawannunukan.wordpress.com/2016/08/08/catatan-anggota-dpr-ri-ari-yusnita-kunjungan-dob-kabudaya.html> (Diakses Tanggal 18 April 2018)

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii.html>) (Diakses Tanggal 10 Mei 2018).

<http://nafsulmuthmainah.Blogspot.com/2016/10/pengertian-faktor-pendukung.html>) (Diakses Tanggal 13 April 2018)

<http://tcrisompoton.ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/2017/28/08/dampak-perkawinan-usia-muda-pada-masyarakat-dayak-agabag.html>),(diakses tanggal 10 Mei 2018)

www.indeksberita.com/2017/02/09sarana-pendidikan-wilayah-perbatasan-masih-memprihatinkan.html) (Diakses Tanggal 13 April 2018)

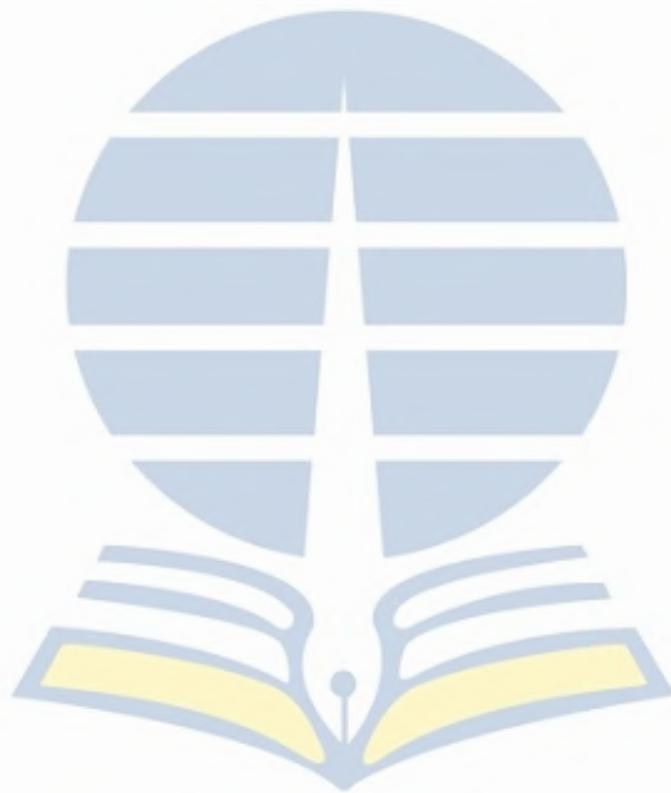


FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Kondisi siswa dan Kelas Lumbis Ogong



Foto Bersama setelah wawancara dengan Ka.SMP Lumbis Ogong



Kondisi Guru Di daerah Perbatasan Lumbis Ogong



Wawancara dengan Kepala UPT Disdik Lumbis dan Lumbis Ogong



Kondisi Pembelajaran di Lumbis Ogong



Pembelajaran di SD Lumbis Ogong



Sosialisasi bersama Peneliti di Lumbis Ogong
Tentang Kemajuan Pendidikan

